



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH PAPUA

Jln. Raya Abepura No. 37 Kotaraja Jayapura
Telepon. 0967-584690, Fax. 0967-584690

Nomor : W.30.PR.04.04-026 5 Januari 2024
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Dokumen
Hal : Penyampaian Laporan LKjIP Tahun 2024 di Lingkungan Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Papua

Yth. Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI
Di - Tempat

Sehubungan dengan telah disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Tahun 2024, bersama ini dengan hormat kami sampaikan laporan LKjIP Tahun 2024 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua. (*Terlampir*)

Demikian penyampaian kami, atas perkenaan dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Anthonius Mathius Ayorbaba
NIP. 19710515 199610 1 001

Tembusan :

1. Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH PAPUA

LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA
TAHUN 2023



KATA PENGANTAR



Puji syukur Kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala Berkat dan Kasih SayangNYA, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Tahun 2023 ini telah tersusun dengan baik dan tepat waktu. Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Tahun 2023 ini merupakan evaluasi capaian kinerja pelaksanaan program kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua beserta jajaran Unit Pelaksana Teknis yang tercantum didalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Dalam laporan ini dipaparkan mengenai perencanaan kinerja tahun 2023 disertai target – targetnya, realisasi dengan output yang diharapkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban kinerja Kantor Wilayah kepada Menteri Hukum dan HAM dan Unit Eselon I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia selama 1 (satu) tahun. Serta wujud dari komitmen Kepala Satuan Kerja kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua untuk pertanggungjawaban pelaksanaan fungsi dan tugas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua diharapkan menjadi acuan dan sumber informasi yang akuntabel guna meningkatkan kepercayaan masyarakat atas kinerja pemerintah khususnya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua. Dan tersusunnya laporan ini kedepannya sebagai bahan perbaikan yang berkesinambungan dalam perencanaan khususnya perencanaan jangka pendek dan menengah.

Pada akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua atas kontribusinya dalam pencapaian kinerja semester I tahun 2023 dengan memegang teguh nilai Kami PASTI TIFA (Transformasi, Improvmen, Fisibilitas dan Akuntabel).



Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Anthonius Mathius Ayorbaba, S.H., M.Si
NIP. 19710515 1996101001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Menteri Hukum dan HAM RI dalam melaksanakan mandat yang telah dituangkan pada Perjanjian Kinerja dan merupakan bentuk capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua sepanjang Tahun 2023.

Adapun beberapa capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua di Tahun 2023 adalah:



Kinerja Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua mendapatkan total pagu awal Rp 168.859.788.000,- dan dilakukan revisi menjadi Rp 184.463.508.000,- dengan realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 Rp 182.184.650.585,- dengan presentase 98.76%. Selain itu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua memiliki capaian kinerja lainnya diantaranya :

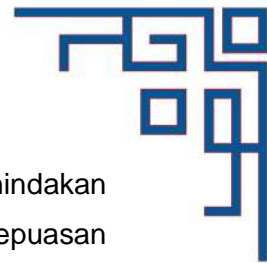
1. Capain RKT-RB General dan Tematik dari 21 Satuan Kerja :

B03	B06	B09	B12
91.2%	95.1%	91.2%	94.7%

Dan LKE Zona Integritas B03 sampai dengan B09 100%

2. Indeks Kepuasan Layanan Internal di lingkungan Kantor Wilayah dengan target indeks 3.1% mendapat realisasi 3.74 meningkat sebesar 82.9%;





3. Target Stabilitas Keamanan melalui pencegahan, pengawasan dan penindakan Keimigrasian meningkat sebesar 113% dari target 3.15 menjadi 3.58 dan Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian dari target 3.25 menjadi 3.87 atau meningkat sebesar 119%;
4. Penilaian Pembinaan Kepribadian WBP (SPPN) meningkat menjadi 82.5% dari target 70% dengan realisasi sebesar 84.81% dan WBP yang memperoleh Layanan dan Bantuan Hukum dengan target indeks 90% dan realisasi 100% meningkat 90%;
5. Mencapai Kepuasan Masyarakat atas Layanan Administrasi Hukum Umum

Perseroan	614
Perkumpulan	56
Yayasan	160
Perseroan Perorangan	462

Dengan PNBPA AHU sebesar 3.297.100.000,-

6. Terselenggaranya 61 Pengharmonisasian dan Pemrakarsa Peraturan Perundang – undangan (RAPERDA);
7. Jumlah permohonan KI yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah sebanyak 339;
8. Pengintegrasian Anggota JDHIN sebanyak 42;
9. Capaian realisasi Bantuan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua : Bantuan Hukum litigasi sebesar 99.74% dan Bantuan Hukum Non Litigasi sebesar 95.18% jadinya total capaian realisasi anggaran Bantuan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua sebesar 99.2%.



DAFTAR ISI

ii	KATA PENGANTAR	39	BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
iii	IKHTISAR EKSEKUTIF		A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
V	DAFTAR ISI		B. REALISASI ANGGARAN
01	BAB I PENDAHULUAN		C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
	A. LATAR BELAKANG		D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA
	B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	65	PENUTUP
	C. MAKSUD DAN TUJUAN		A. KESIMPULAN
	D. ASPEK STRATEGIS		B. SARAN
	E. ISU STRATEGIS		
	F. SISTEMATIKA PELAPORAN		
13	BAB II PERENCANAAN KINERJA	68	LAMPIRAN
	A. RENCANA STRATEGIS		A. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
	B. PERJANJIAN KINERJA		B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
			C. PRESTASI/PENGHARGAAN TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

A.LATAR BELAKANG

B.TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

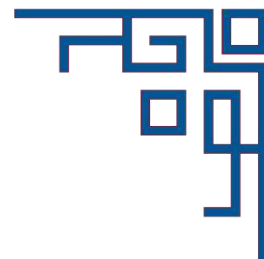
C.MAKSUD DAN TUJUAN

D.ASPEK STRATEGIS

E.ISU STARTEGIS

F.SISTEMATIKA PELAPORAN





A. LATAR BELAKANG

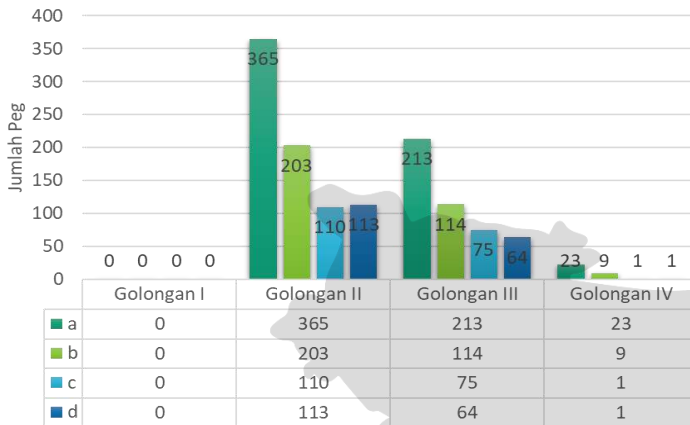
Kantor wilayah (kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di setiap provinsi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kanwil terdiri atas beberapa divisi serta sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT), termasuk Kantor Imigrasi, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lapas Terbuka, Lapas Narkotika, Rumah Tahanan Negara (Rutan), Cabang Rutan, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), Balai Pemasyarakatan (Bapas), Balai Harta Peninggalan (BHP), serta Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim). Salah satunya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua memiliki 29 Satuan Kerja yang terdiri dari 9 Unit Eselon I pada Kantor Wilayah dan 20 (dua puluh) Unit Pelaksana Teknis yang terdiri dari 15 UPT Pemasyarakatan dan 5 UPT Keimigrasian, diantaranya yaitu Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU), Ditjen Pemasyarakatan, Ditjen Keimigrasian, Ditjen Kekayaan Intelektual (KI), Ditjen Peraturan Perundang – Undangan (PP), Dukungan Manajemen (SEKJEN), Ditjen HAM, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia (BALITBANGKUMHAM), Bapas Kelas II Jayapura, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Abepura, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wamena, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nabire, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Biak, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Serui, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke, Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Tanah Merah, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Jayapura, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Timika, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jayapura, Rupbasan Kelas I Jayapura, Balai Pemasyarakatan Keerom, Balai Pemasyarakatan Kelas II Merauke, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke, Kanim Kelas I TPI Jayapura dan RUDENIM Jayapura. Dengan wilayah kerja terdapat pada 10 (sepuluh) Kabupaten / Kota, sebagaimana tergambar pada profil berikut :

Satuan Kerja	Jumlah SDM
Kantor Wilayah	135
UPT PAS	851
UPT Imigrasi	315

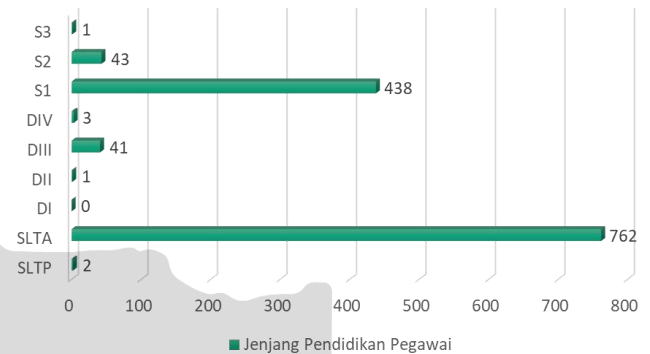
Jumlah ASN pada di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua sebanyak 1.129 orang dengan latar belakang pendidikan yang berbeda. Sebagaimana terdapat dalam grafik berikut ini :



SDM di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua



Jenjang Pendidikan Pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua



Grifik 1.1 Data ASN di lingkungan Kantor Wilayah

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah adalah sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di provinsi yang berada dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,
- (2) Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang kepala,
- (3) Kepala kantor wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas para kepala divisi.

Pasal 2

Kantor wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- (1) Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
- (2) Pelaksanaan pelayanan dibidang administrasi hukum umum, hak kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
- (3) Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah, pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum, serta konsultasi dan bantuan hukum;
- (4) Pengkoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelayanan Teknis dilingkungan Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia dibidang keimigrasian dan bidang masyarakat;
- (5) Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, penegakan hak asasi manusia; dan
- (6) Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

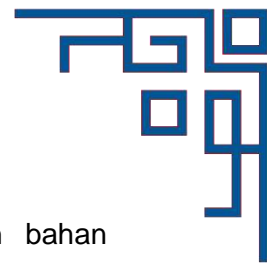
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua dalam pelaksanaan tugas dan fungsi mempunyai peran strategis yaitu Pembentukan Hukum, Pelayanan Hukum dan Penegakan Hukum serta Pemajuan Hak Asasi Manusia di Tanah Papua. Pencapaian tersebut akan berhasil diwujudkan jika kita senantiasa memperbaiki kualitas kerja dengan menerapkan prinsip tata kelola pemerintah yang baik disegala bidang. Sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda atau heterogen, maka diperlukan suatu kesatuan komitmen dan dokumen perencanaan strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Visi Presiden yaitu Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong. Dan berikut adalah tugas dan fungsi setiap Divisi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua :

(a) Divisi Administrasi

Divisi Administrasi melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pembinaan dan dukungan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal;

(b) Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Divisi Pelayanan Hukum dan HAM mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal dan Badan yang bersangkutan di wilayah;



1. Administrasi Hukum Umum

Administrasi Hukum Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis;

2. Kekayaan Intelektual

Program Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis dibidang kekayaan intelektual dan inventarisasi kekayaan intelektual komunal lainnya;

3. Program Pembentukan Hukum

Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah kedalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam setiap proses penyusunan mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan, dan pengundangannya. Di tingkat wilayah peran strategis tersebut diemban oleh Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah;

4. Program Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)

Kementerian Hukum dan HAM memiliki fungsi strategis dalam tahapan legislasi. Badan Pembinaan Hukum Nasional memiliki kewenangan dalam tahap pra legislasi dan pasca legislasi. Pembinaan Hukum Nasional memiliki fungsi pembentukan hukum sekaligus fungsi pelayanan hukum. Fungsi-Fungsi tersebut dilakukan melalui serangkaian tugas yang saling berkaitan. Fungsi pembentukan hukum dilakukan melalui perencanaan hukum serta analisa dan evaluasi hukum, sedangkan fungsi pelayanan hukum dilakukan melalui dokumentasi dan informasi hukum serta penyuluhan dan bantuan hukum;

5. Program Pemajuan HAM

Program Pemajuan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang :

Diseminasi HAM, Penguatan Hak Asasi Manusia, Informasi Hak Asasi Manusia, Pelayanan Komunikasi Masyarakat, Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, Kabupaten/Kota peduli Hak Asasi Manusia

6. Program Balitbangkumham

Program Balitbangkumham mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan,



evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pengkajian, penelitian dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia.

(c) Divisi Pemasyarakatan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat pelaksanaan pembinaan berdasarkan putusan hakim dalam rangka mewujudkan reintegrasi sosial terhadap narapidana. Reintegrasi sosial merupakan upaya pengembalian hidup, kehiduan dan penghidupan narapidana guna mengembalikan ikatan narapidana dengan masyarakat. Bagi seseorang yang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan atau disebut Klien Pemasyarakatan ditempatkan di Balai Pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan (UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan). Pada proses peradilan, benda sitaan dan barang rampasan Negara sebagai aset tindak pidana ditempatkan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara (Rupbasan).

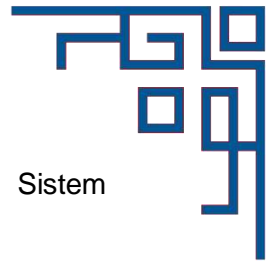
(d) Divisi Keimigrasian

Menjaga pintu gerbang Negara Republik Indonesia serta pengawasan Keimigrasian, merupakan salah satu tanggung jawab dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada umumnya dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua pada khususnya.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LKJIP) Tahun 2023 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua untuk menyajikan pencapaian pelaksanaan Perjanjian Kinerja serta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan dasar hukum sebagai berikut :

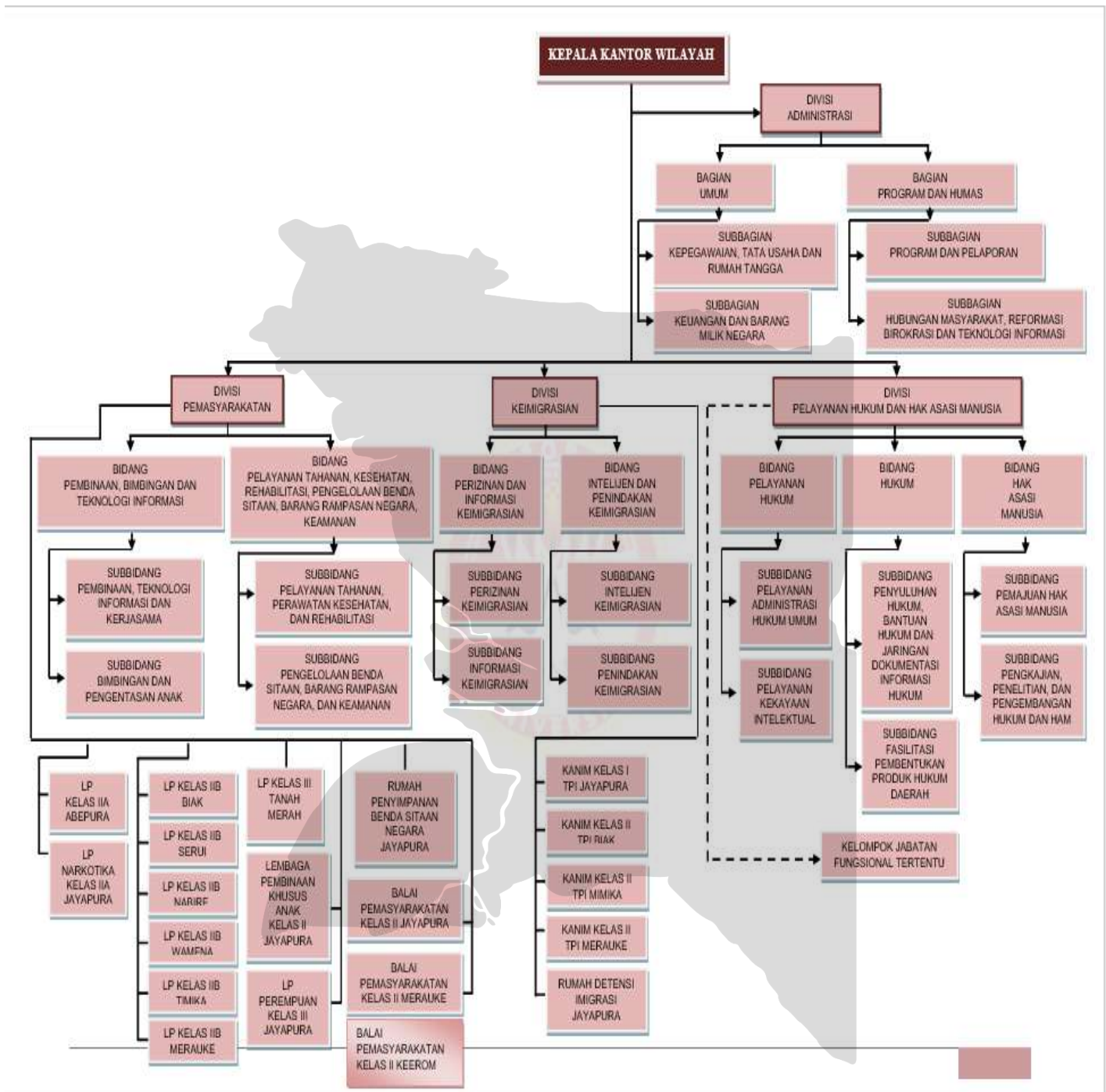
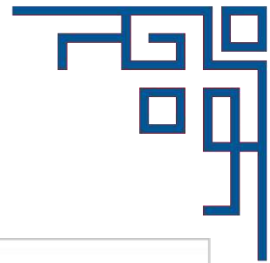
- Dasar Hukum
 - a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;



- e) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- g) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- h) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024;
- i) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan kinerja Instansi Pemerintah;
- j) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-04.PR.03.01 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Tujuan pelaporan kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua adalah :

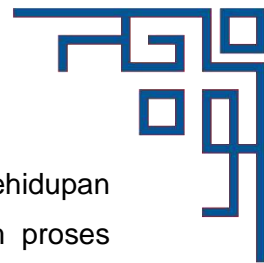
1. Memberikan informasi pencapaian kinerja dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua selama Tahun 2023;
2. Sebagai bahan evaluasi kinerja dan perbaikan dalam meningkatkan kinerja di tahun berikutnya.



Gambar 1.1. Struktur Organisasi

D. ASPEK STRATEGIS

Sebagaimana pemerintahan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan pembangunan Hukum dan HAM sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Pelaksanaan pembangunan hukum



dalam konteks tindakan atau kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk kehidupan hukum dan hak asasi manusia ke arah yang lebih baik dan kondusif. Dalam proses pelaksanaannya, kegiatan pembangunan hukum dan hak asasi manusia yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM tidak bisa dilakukan sendiri tetapi harus sejalan dengan kebijakan Presiden dan berkolaborasi dengan pembangunan bidang lain yang dilaksanakan lembaga lain. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua berperan serta mendukung Pemerintah pusat dalam mewujudkan pembangunan hukum, agar selaras, terarah dan terkendali dengan tetap perpegang pada tata nilai PASTI TIFA. Diantaranya yaitu:

1. Pemetaan Hukum di daerah dan Penetapan kinerja Kantor Wilayah yang mendukung keberhasilan program dan kebijakan strategis;
2. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka pelaksanaan *Restoratif Justice* dan peningkatan pemahaman hukum dan HAM;
3. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka penguatan perlindungan dan pemajuan KI di daerah;
4. Penataan regulasi dalam rangka sinergi pusat dan daerah;
5. Pemajuan dan perlindungan HAM di daera;
6. Penguatan layanan hukum di daerah, termasuk kegiatan bantuan hukum litigasi dan non litigasi.

E. ISU STRATEGIS

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua selama Tahun 2023, terdapat isu strategis, yang menghambat pencapaian kinerja :

1. Terjadi kesalahan dalam pengiriman data sejumlah pegawai yang naik pangkat pada email yang sudah tidak aktif yang menyebabkan sekitar 27 orang pegawai tidak bisa naik pangkat;
2. Kapasitas bandwidth kurang memadai untuk menunjang kebutuhan jaringan internet sehingga sering terjadi gangguan internet yang menyebabkan kinerja terhambat;
3. Sarana dan Prasarana dalam menunjang kinerja pada beberapa bagian/bidang belum memadai dan memenuhi kebutuhan pegawai;
4. Penatausahaan BMN pada Kantor Wilayah mengalami keterlambatan atau terhambat dikarenakan barang hilang dan ada beberapa aset yang tidak dikembalikan oleh pensiunan dan tidak di akui oleh satuan kerja lain;
5. Penyerapan pada IKPA untuk mencapai target mengalami keterlambatan dikarenakan kurang perencanaan dari penanggungjawab kegiatan, keterlambatan pengajuan



- pertanggungjawaban dari kegiatan yang dilaksanakan dan pada halaman III DIPA mengalami ketidaksesuaian dengan rencana dan penarikan atau realisasi perbulannya;
6. Pengelolaan Barang dan Jasa (BARJAS) belum memiliki SOP sehingga dalam proses administrasi tidak tertib;
 7. Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) untuk pendaftaran perseroan perorangan dan layanan apostille belum banyak mendapat respon masyarakat;
 8. Layanan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada Kantor Wilayah Papua belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, belum ada bantuan untuk pembayaran PNPB pendaftaran KI, belum ada sinergi dengan PEMDA atau Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi Provinsi/Kota;
 9. Masih minimnya LBH yang sudah terverifikasi dan terakreditasi, kekurangan anggaran, PEMDA yang banyak memiliki PERDA dan letak geografis;
 10. Kabupaten/Kota yang masih minim Peduli HAM, UPT yang masih minim memenuhi kriteria P2HAM, Pos Peduli HAM yang kurang berjalan efektif, Kab/Kota yang belum melaksanakan harmonisasi dan kurangnya Perancang Madya.

F. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2023.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Menyajikan ringkasan isi Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2023.

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara singkat latar, tugas, fungsi dan struktur organisasi, maksud dan tujuan, aspek strategis, isu strategis, sistematika laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan Rencana Strategis yang berisi visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan/strategi dalam upaya pencapaian kinerja, dan Perjanjian Kinerja yang berisi lembar/dokumen penugasan untuk melaksanakan program/kegiatan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



Menguraikan capaian kinerja organisasi, analisis pencapaian kinerja serta analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan upaya yang dilakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mencapai Target Kinerja sesuai Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain memberikan penjelasan dan analisis capaian kinerja, setiap indikator kinerja juga dilakukan analisis

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan dan saran menyeluruh Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2023 serta upaya/strategi dalam meningkatkan capaian kinerja tahun 2024.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.
Prestasi dan Penghargaan.



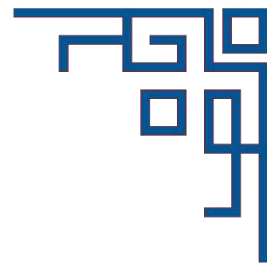
BAB II

PERENCANAAN

KINERJA

- A. RENCANA STRATEGIS
- B. PERJANJIAN KINERJA





A. RENCANA STRATEGIS

- **Visi**

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020 – 2024 adalah :

” Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegrasi dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden : ” Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

- **Misi**

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM, melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut :

1. Membentuk peraturan perundang – undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas;
3. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya;
4. Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan;
5. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum dan Masyarakat;
6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan masyarakatan;
7. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintah yang Baik melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.

- **Tata Nilai**

- a) Tata Nilai Core Values ASN BerAKHLAK


Sejak tanggal 27 Juli 2021 telah diluncurkan core values ASN ‘BerAKHLAK’ dan employer branding ASN ‘Bangga Melayani Bangsa’ oleh Presiden yang bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar yang ada di dalam diri ASN Indonesia. Nilai-



nilai dasar ASN “BerAKHLAK” merupakan akronim dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai-nilai ini diharapkan akan dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional. BerAKHLAK merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Adanya core values ASN ini sebagai sari dari nilai – nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN. a. Berorientasi Pelayanan yakni memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti. b. Akuntabel yakni melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Kompeten yakni meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. d. Harmonis yakni menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif. e. Loyal yakni memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. f. Adaptif yakni cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif. g. Kolaboratif yakni memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam kerjasama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

b) Tata Nilai PASTI

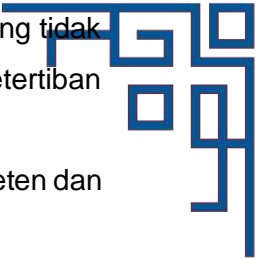
Dalam mencapai visi dan misi serta tujuan dan yang telah ditetapkan, setiap ASN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengacu pada kode etik dan kode perilaku dalam tata nilai Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif (PASTI) yang meliputi: a. Profesional berarti mampu menyelesaikan tugas dengan terpuji, tuntas sesuai dengan kompetensi atau keahlian dan berintegritas untuk mencapai hasil prima melalui kerja sama; b. Akuntabel berarti mampu bertanggung jawab terhadap setiap tindakan, perilaku, dan tugas, baik dari segi proses maupun hasil; c. Sinergi berarti mampu bekerja sama dan membangun kemitraan yang harmonis dengan pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas; d. Transparan berarti mampu menyajikan



data dan informasi terkait kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasilnya serta menjamin aksesibilitas publik terhadap data dan informasi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. Inovatif berarti mampu menciptakan dan mengembangkan inovasi melalui inisiatif dan kreativitas untuk melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi.

- **Tujuan dan Sasaran Strategis**

Tujuan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua tentunya selaras dengan penjabaran dari visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM yang merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi dan misi maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut:

- a) Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis dan sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah serta terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b) Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang prima;
 - c) Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian izin pendirian badan usaha, memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia;
 - d) Terlindunginya hak asasi manusia;
 - e) Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan;
 - f) Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara; dan
 - g) Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang kompeten dan
- 



terlaksananya reformasi birokrasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

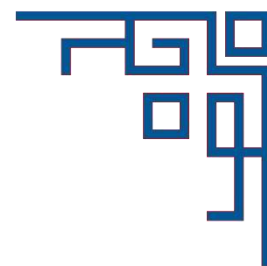
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua dalam membantu mewujudkan visi, misi dan tujuan Kementerian Hukum dan HAM maka telah disusun indikator kinerja utama dengan target yang harus dicapai selama tahun anggaran 2023 untuk menjadikan manajemen pemerintah efektif, efisien dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, adalah sebagai berikut:

- a) Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegrasi, efektif dan efisien;
- b) Memastikan pelayanan publik dibidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
- c) Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI;
- d) Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang efektif dan efisien;
- e) Terpenuhinya peraturan pengundangan – undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang – undangan;
- f) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
- g) Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM;
- h) Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

Untuk mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja pada tahun 2023, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua memperoleh anggaran dengan pagu awal sebesar Rp **168.859.788.000,-** (Seratus enam puluh delapan milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) setelah direvisi menjadi Rp **184.463.508.000,-** dan telah direalisasikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp **182.184.650.585,-** atau **98.76%** dengan pengalokasian melalui perjanjian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua sebagai berikut :

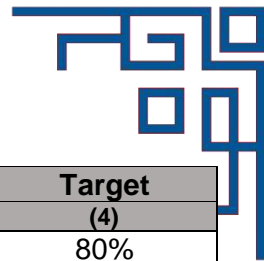
- Divisi Administrasi

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Anggaran (dalam ribuan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1	20.200.443.000,-



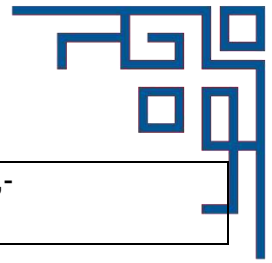
- Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

No. (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Kegiatan (3)	Target (4)
1.	Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	1. Persentase peningkatan PNBPA Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%
		2. Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	86%
2.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	86%
3.	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	133 Layanan
		Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus
4.	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus
		Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	1 Laporan
5.	Rekomendasi hasil analisis strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	80%
		Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku
6.	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%
7.	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	6 Orang
8.	Terselenggaranya fasilitas perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan
9.	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%



No. (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Kegiatan (3)	Target (4)
	informasi hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75 (indeks)
		Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%
		Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN	20%
10.	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	4 Intansi Pemerintah
		Jumlah kab/kota peduli HAM	3 Instansi Pemerintah
		Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah
11.	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 3.966.488.000,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah)	Rp. 2.045.065.000,-
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp. 1.110.606.000,-
Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	Rp. 810.817.000,-
Program Pembentukan Regulasi	Rp. 444.876.000,-
Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp. 310.000.000,-
Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp. 134.876.000,-
Program Pemajuan dan Penegakan HAM	Rp. 378.170.000,-
Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	Rp. 378.170.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 223.029.000,-



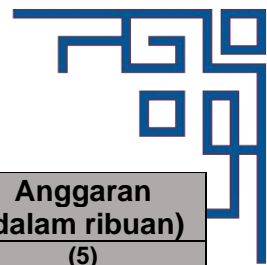
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	Rp. 223.029.000,-
--	-------------------

- Divisi Imigrasi

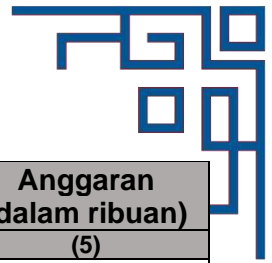
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Anggaran (dalam ribuan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25 (Indeks)	16.928.634.000,-
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13 (Indeks)	

- Divisi Pemasyarakatan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Anggaran (dalam ribuan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan yang berkualitas di wilayah	1. Indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah	82 (Indeks)	1.076.796.000
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	2. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%	
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%	
		4. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%	
3.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%	
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%	
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%	
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%	

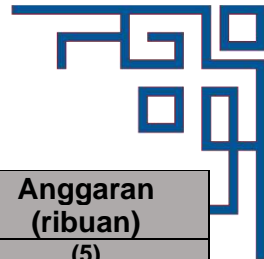


No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Anggaran (dalam ribuan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	17%	
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%	
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%	
4.	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	80%	
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuat hukum tetap	80%	
5.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	60%	
		2. Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%	
		3. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35%	
6.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	1. Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	80%	
		2. Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%	
		3. Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	90%	
		4. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	90%	
7.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakat di Bidang Keamanan dan Ketertiban	1. Persentase pengaduan yang diselesaikan	85%	
		2. Persentase pencegahan gangguan kamtib	80%	
		3. Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh	85%	



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Anggaran (dalam ribuan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.		Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib		
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	
8.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%	
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Anggaran (ribuan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%	
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%	
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang	85%	



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Anggaran (ribuan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	27%	

B. PERJANJIAN KINERJA

Penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) ini dilaksanakan untuk memenuhi Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN RB) Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KEPALA DIVISI ADMINISTRASI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hendrik Pagiling
Jabatan : Kepala Divisi Administrasi Papua

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Anthonius Mathius Ayorbaba
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Papua

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

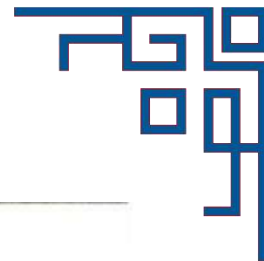
Jayapura, 23 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Papua

Anthonius Mathius Ayorbaba
NIP. 19710515 199610 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Administrasi Papua

Hendrik Pagiling
NIP. 19830502 200112 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI ADMINISTRASI DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAM PAPUA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi.	87,0
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja	92,0

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	1. Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB"	94 %
		2. Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90	94 %
2.	Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham	WTP

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp 20.200.443.000,-
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Rp 20.200.443.000,-

Jayapura, 23 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Papua


Anthonyus Mathius Ayorbaba
NIP. 19710515 199610 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Administrasi Papua


Hendrik Pagiling
NIP. 19830502 200112 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI ADMINISTRASI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hendrik Pagiling
Jabatan : Kepala Divisi Administrasi Papua

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jayapura, 23 Januari 2023

Kepala Divisi Administrasi Papua

Hendrik Pagiling
NIP. 19830502 2001 12 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhamad Mufid
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Papua

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Anthonius Mathius Ayorbaba
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Papua

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

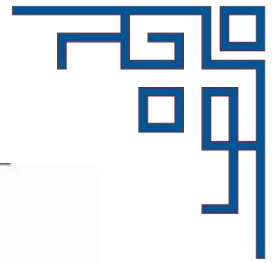
Jayapura, 23 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Papua

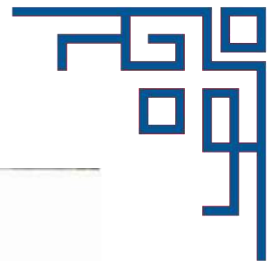
Antthonius Mathius Ayorbaba
NIP. 197105151996101001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Papua

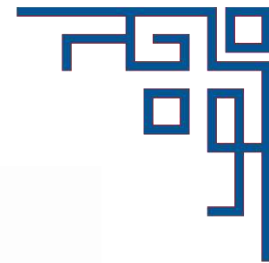
Muhamad Mufid
NIP. 197603042005011001



No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Hukum Umum yang Berkepastian Hukum	Persentase penyelesaian permohonan layanan administrasi hukum umum yang tepat waktu dan berkepastian hukum	88 %
2.	Terwujudnya Otoritas Pusat yang Efektif dan Tepat Sasaran	Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti	88 %
3.	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di Seluruh Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	3,34 (indeks)
4.	Mewujudkan pemanfaatan rekomendasi hasil analisis kebijakan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan hukum dan hak asasi manusia	Persentase pemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan hukum dan hak asasi manusia	80 %
		Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	20 %
5.	Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas	Persentase (%) Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan	80%
		Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	200 Orang
		Persentase (%) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan	80%
6.	Terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum	Persentase hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	21%
		Persentase jumlah RUU prakarsa pemerintah dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 yang masuk kedalam Prolegnas Prioritas Tahunan	15%
7.	Terwujudnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	77 (Indeks)
		Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%
		Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76.75 (indeks)




No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
7.	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	6 Orang
8.	Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan
9.	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%
		Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75 (indeks)
		Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%
		Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN	20%
10.	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	4 Instansi Pemerintah
		Jumlah kab/kota peduli HAM	3 Instansi Pemerintah
		Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah
11.	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi



Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 3.966.488.000,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah)	Rp. 2.045.065.000,-
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp. 1.110.606.000,-
Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	Rp. 810.817.000,-
Program Pembentukan Regulasi	Rp. 444.876.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp. 310.000.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp. 134.876.000,-
Program Pemajuan dan Penegakan HAM	Rp. 378.170.000,-
Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	Rp. 378.170.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 223.029.000,-
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	Rp. 223.029.000,-

Jayapura, 23 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Papua


Anthonius Mathius Ayorbaba
NIP. 19718515 199610 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Papua


Muhamad Mufid
NIP. 19760304 200501 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhamad Mufid
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Papua

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jayapura, 23 Januari 2023

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Papua

Muhamad Mufid
NIP. 19760304 200501 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ian Fidihanto Markos
Jabatan : Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Anthonius Mathius Ayorbaba
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

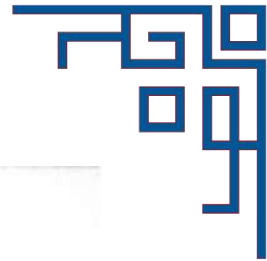
Jayapura, 23 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Papua

Anthonius Mathius Ayorbaba
NIP. 19710515 199610 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah
Papua

Ian Fidihanto Markos
NIP. 19691211 199003 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAM PAPUA DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAM PAPUA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,25 (Indeks)
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,25 (Indeks)
2.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25 (Indeks)
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13 (Indeks)



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ian Fidihanto Markos
Jabatan : Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jayapura, 23 Januari 2023

Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah
Papua

Ian Fidihanto Markos
NIP. 19691211 199003 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Endang Lintang Hardiman
Jabatan : Kepala Divisi Pemasyarakatan Papua

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Anthonius Mathius Ayorbaba
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Papua

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

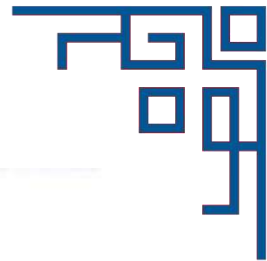
Jayapura, 23 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Papua

Anthonius Mathius Ayorbaba
NIP. 19710515 199810 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pemasyarakatan Papua

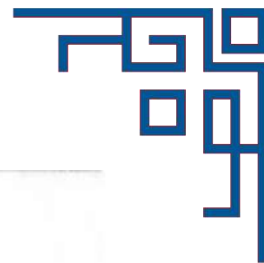
Endang Lintang Hardiman
NIP. 19670620 199303 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN PAPUA DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA**

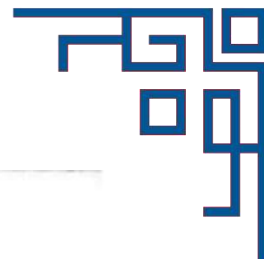
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80 (Indeks)
2.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	1. Persentase klien Pemasyarakatan yang produktif, mandiri dan berdayaguna	50,0 %
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai)	80,0 %
		3. Persentase menurunnya residivis	1,0 %
		4. Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	90,0 %
3.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan	80,0 (Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan	85 (Nilai Indeks)
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan	85 (Nilai Indeks)
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan	85 (Nilai Indeks)
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	83 (Nilai Indeks)
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara,	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	56 (Nilai Indeks)
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	92,5 (Nilai Indeks)
		3. Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasyarakatan	60 (Nilai Indeks)
		4. Indeks Pembinaan Khusus Anak	74 (Nilai Indeks)
		5. Indeks Pengelolaan Basan Baran	80 (Nilai Indeks)

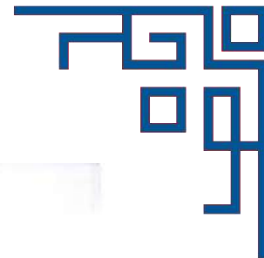


No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan	6. Indeks Pelayanan Tahanan	80 (Nilai Indeks)
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan	80 (Nilai Indeks)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pamasarakatan yang berkualitas di wilayah	1. Indeks penyelenggaraan pamasarakatan di wilayah	82 (Indeks)
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	2. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%
		4. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%
3.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian	70%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	17%
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%
4.	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	80%



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuat hukum tetap	80%
5.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	60%
		2. Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%
		3. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35%
6.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	1. Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	80%
		2. Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%
		3. Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	90%
		4. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	90%
7.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakat di Bidang Keamanan dan Ketertiban	1. Persentase pengaduan yang diselesaikan	85%
		2. Persentase pencegahan gangguan kamtib	80%
		3. Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
8.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	<ol style="list-style-type: none">1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	<p>80%</p> <p>94%</p> <p>97%</p> <p>80%</p> <p>85%</p> <p>85%</p> <p>80%</p> <p>27%</p>

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 1.076.796.000
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 1.076.796.000

Jayapura, 23 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Papua


Anthonyus Mathius Ayorbaba
NIP. 19710515 199610 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pemasarakatan Papua


Endang Lintang Hardiman
NIP. 19670620 199303 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Endang Lintang Hardiman
Jabatan : Kepala Divisi Pemasyarakatan Papua

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jayapura, 23 Januari 2023

Kepala Divisi Pemasyarakatan Papua


Endang Lintang Hardiman
NIP. 19670620 199303 1 001



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

- A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
- B. REALISASI ANGGARAN
- C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
- D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA





A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 – 2024 terdapat sasaran kegiatan yang targetnya harus diselesaikan pada tahun 2023, namun karena masih pada tahap semester I maka tidak semua kegiatan telah terlaksana 100%. Pengukuran capaian kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing sasaran kegiatan. Dari hasil pengukuran capaian setiap Indikator Kinerja Utama menghasilkan nilai pencapaian sasaran kegiatan. Dengan menggunakan rumus capaian Makin tinggi realisasi menunjukkan semakin baik pencapaian kinerja atau sebaliknya makin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin rendah.

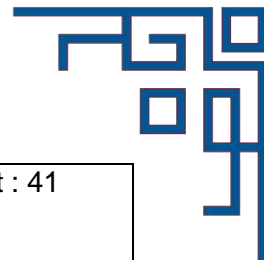
Realisasi Target	X	100%	=	Persentase Pencapaian Target
-------------------------	----------	-------------	----------	-------------------------------------

Tabel 1.1. Pencapaian Sasaran Kegiatan Divisi Administrasi Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1	22,43	7,23

Sasaran kegiatan divisi administrasi tercapai dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Layanan Internal dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan target 3,1 Indeks. Perbandingan Indeks Kepuasan Layanan Internal di lingkungan Kantor Wilayah merupakan indikator yang berasal dari sasaran kegiatan Divisi Administrasi yaitu “ Terwujudnya Layanan Administrasi dan Fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien yang capainnya diperoleh dari melalui pengisian kuisioner selama 1 (satu) tahun 2023, berikut data responden per triwulan :

PERIODE	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
Triwulan I	3,1	11.35	Dilaksanakan survey integritas terhadap pengelolaan SDM, pelaksanaan anggaran, kesesuaian penerapan aturan pada Kantor Wilayah mendapat responden dengan nilai mutu A (sangat Baik) Januari : 36 orang responden,



			Februari : 31 orang responden dan Maret : 41 orang responden
Triwulan II	3,1	3,63	Dilaksanakannya survey integritas terhadap pengelolaan SDM , pelaksanaan anggaran, kesesuaian penerapan aturan pada Kantor Wilayah pada april, mei dan juni
Triwulan III	3,1	3,75	Juli : Tidak ada hasil survey Agustus: Dilaksanakannya survey integritas terhadap pengelolaan SDM , pelaksanaan anggaran, kesesuaian penerapan aturan pada Kantor Wilayah. Survey dilaksanakan pada 46 responden dengan nilai mutu A (sangat baik). September:
Triwulan IV	3,1	3,7	Dilaksanakannya survey integritas terhadap pengelolaan SDM , pelaksanaan anggaran, kesesuaian penerapan aturan pada Kantor Wilayah dengan hasil bulan desember sebanyak 22 responden

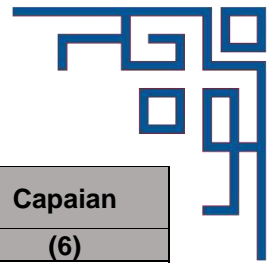
Berdasarkan hasil survey dapat di hitung dengan rumus realisasi dibagi dengan target dikalikan dengan 100%. Jadi setelah realisasi triwulan I sampai triwulan IV di jumlah totalnya di bagi target dikalikan dengan 100% menjadi capaian 22,43 dibagi target 3,1 kali 100% totalnya 7.23 artinya capaian melebihi target.

Berikuti perbandingan Capaian tahun 2023 dengan tahun 2022 :

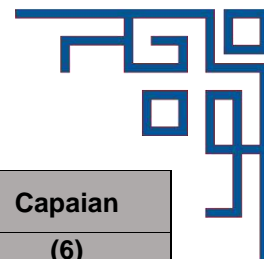
Tahun 2023			Tahun 2022		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
3,1	22,43	7,23	3,1	36,5	11,7

Dari perbandingan tahun 2023 dengan tahun 2022 diatas menyimpulkan bahwa responden untuk survey mengalami penurunan.

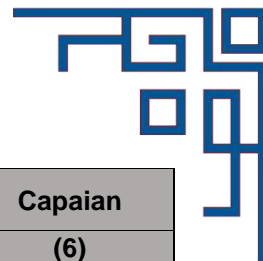
Tabel 1.2 Pencapaian Sasaran Kegiatan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	1. Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	5	100%
		2. Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	86%	-	-
2.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	86%	86	100%
3.	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	133 Layanan	219	1,647%
		Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus	9	9
4.	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%	516	516%
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus	5	2,5%
		Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	1 Laporan	3	3
5.	Rekomendasi hasil analisis strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	80%	80	100%
		Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	1	100%
6.	Terfasilitasinya rancangan	Persentase rancangan perda yang difasilitasi	80%	81	101 %



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	produk hukum di daerah	oleh kantor wilayah kementerian hukum			
7.	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	6 Orang	12	200%
8.	Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan	2	100%
9.	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%	36	450%
		Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%	63	78,75%
		Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75 (indeks)	76	99%
		Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%	0	0
		Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN	20%	42	210%
10.	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	4 Instansi Pemerintah	15	3,75%
		Jumlah kab/kota peduli HAM	3 Instansi Pemerintah	9	3%
		Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui	1 Instansi Pemerintah	9	9%



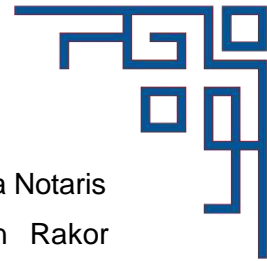
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		elayanan publik berbasis HAM			
11.	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi	6	200%

1. Sasaran Kegiatan Administrasi Hukum Umum “AHU”

a. Dengan indikator kinerja kegiatan **Presentasi PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah**. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023 : Indikator kinerja kegiatan AHU memiliki 1 (satu) indikator yaitu persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah. Capaian kinerja mendapat realisasi sebesar 5 atau mencapai 100% dari target 5%. Indikator capaian ini dapat dicapai melalui beberapa kegiatan yaitu Koordinasi ke Notaris dan Kantor Imigrasi, Rapat persiapan dan koordinasi awal terkait optimalisasi pelaporan dan pemutakhiran data pelantikan PPNS melalui aplikasi; penyebaran informasi layanan AHU di wilayah (Kewarganegaraan, pewarganegaraan, apostille, perseroan perorangan); Pengumpulan data alamat kantor dan kepengurusan partai politik tingkat provinsi; dan pendataan anak berkewarganegaraan ganda terbatas berdasarkan UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia. **Perbandingan indikator kinerja kegiatan AHU dan Capaian tahun 2023 dengan capaian tahun 2022 :** Berdasarkan hasil perbandingan ditahun 2023 capaian indikator kegiatan AHU sebesar 5 atau 100% dari target sedangkan tahun 2022 capaian 7 atau 140% dari target 5% ini artinya terjadi penurunan di tahun 2023.

b. **Indikator Kinerja Kegiatan Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum tidak dilaksanakan karena tidak terdapat Balai Harta Peninggalan dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua.**

2. **Sasaran Kegiatan Meningkatnya Efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD dengan Indikator Kinerja Kegiatan “ Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah “ :** Perbandingan target dengan realisasi tahun 2023 indikator kinerja kegiatan Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat adalah 100% dari realisasi 86 dengan target 86% artinya telah mencapai target, capaian ini diperoleh dari melaksanakan Koordinasi ke notaris di beberapa kabupaten di Papua,



Pembentukan SK Tim PMPJ dan SK Tim PMPJ dan SK Tim Pembaharuan Data Notaris & Identifikasi Status Notaris Koordinasi ke notaris dan melaksanakan kegiatan Rakor MPW, MPD, MKN, dan Notaris terkait PMPJ serta melaksanakan webinar pengisian kuesioner PMJP. **Perbandingan capaian kinerja kegiatan dari tahun 2023 dengan tahun sebelumnya** : Jika dibandingkan dengan tahun 2022 dapat dilihat adanya kenaikan target dan capaian, pada tahun 2022 sebesar 94,65% dari realisasi 75,15 dengan target 82%, sedangkan ditahun 2023 dengan target 86% mendapat realisasi 86 jadinya 100% yang artinya pada tahun 2023 indikator kinerja kegiatan terpenuhi.

3. Sasaran Kegiatan Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

a. Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah “Perbandingan realisasi dan target tahun 2023 : Tahun 2023 terdapat banyak permohonan kekayaan intelektual ini dapat dilihat dari triwulan I terdapat 35 permohonan yang terdiri dari hak cipta lagu, motif batik, buku dan gambar, triwulan II terdapat 62 pemohon yang terdiri dari hak cipta lambang daerah, seni lukis, buku, lagu dan merek, selanjutnya triwulan III sebanyak 71 pemohon dari merek dan hak cipta dan triwulan IV terdapat 51 dari permohonan hak cipta dan merek. Jadi total realisasi tahun 2023 sebanyak 219 permohonan kekayaan intelektual, jika realisasi dibagi dengan target 133 layanan maka capaian tahun 2023 adalah 1,647%. “ **Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun sebelumnya**”

Tahun 2023			Tahun 2022		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
133	219	1,647%	3	541	180,33%

Berdasarkan perbandingan di tahun 2023 dengan tahun 2022 menunjukkan bahwa pada tahun 2022 memiliki banyak pemohon dari pada tahun 2023 ini bisa disebabkan karena Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua saat ini telah berupaya untuk menggencarkan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual terhadap Masyarakat lokal, namun belum dapat menjangkau seluruh lapisan Masyarakat sehingga masih banyak yang belum mengetahui pentingnya mendaftarkan karya dan mendapatkan Hak cipta, belum adanya bantuan untuk pembayaran PNBP Pendaftaran KI, dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi provinsi / kota secara keseluruhan belum melakukan sinergi dengan Kantor Wilayah, Pendaftaran akan dapat meningkat jika mendapat bantuan anggaran dari pemerintah daerah. Diharapkan kedepannya Penyebaran informasi KI lebih banyak lagi sehingga masyarakat lebih memahami pentingnya pendaftaran KI, Perbanyak layanan KI Langsung atau KI Onsite Service, Masyarakat berharap adanya bantuan untuk pembayaran PNBP Pendaftaran KI dan



banyak Masyarakat yang belum bisa melakukan pendaftaran sendiri secara digital sehingga harus di dampingi oleh petugas;

- b. Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual “**Perbandingan realisasi dengan target tahun 2023 : Berdasarkan perhitungan menunjukkan dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 seperti sosialisasi terkait Pemantauan dan Pengawasan di Bidang Kekayaan Intelektual dengan Instansi terkait, kegiatan Promosi dan Desiminasi terkait Kekayaan Intelektual Komunal, Sosialisasi terkait Indikasi Geografis, Sosialisasi Kekayaan Intelektual dengan tema One Village One Brand, Kegiatan Mobili IP Clinic, dan Sosialisasi terkait Kawasan Karya Cipta di Hotel Aston Jayapura. Dari hasil kegiatan tersebut menunjukkan realisasi tahun 2023 adalah 9 dari target 1 Lokus artinya capaian memperoleh 9%. **Jika dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2023 dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :** pada tahun 2023 capaian memperoleh 9% sedangkan 53% artinya ada penurunan karena kurangnya dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi provinsi / kota secara keseluruhan belum melakukan sinergi dengan Kantor Wilayah.

4. Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM “

- a. Indikator Kinerja Kegiatan “ Persentase Penanganan aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual” :** Perbandingan realisasi dengan target tahun 2023, berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa capaian tahun 2023 untuk indikator kinerja kegiatan Persentase Penanganan aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual adalah sebesar 516% dari target 100% dengan realisasi sebanyak 516 aduan yang telah ditangani dan juga ada beberapa aduan yang telah dimasukan diantaranya yaitu aduan terkait sertifikat Hak Cipta Buku panduan dari GBGP, perbedaan alamat dan pemegang Hak dari GKI Kingmi dan perbedaan alamat dan pemegang Hak Cipta pada sertifikat dari GKI Kingmi. **“ Perbandingan capaian realisasi tahun 2023 dengan tahun sebelumnya”** Berdasarkan hasil menunjukkan pada tahun 2023 capaian indikator kinerja kegiatan mendapat 516% yang telah memenuhi bahkan melebihi target tahun 2023, sedangkan jika dilihat pada tahun 2022 hasil capaian menunjukkan 165% dari target 100%, ini menyimpulkan bahwa adanya kenaikan dan antusias masyarakat yang telah mengetahui untuk dapat melakukan pengaduan terkait hak sipa dan lainnya di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua;
- b. “ Indikator Kinerja Kegiatan “ Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah :** Realisasi dibandingkan dengan target dan dikalikan dengan 100% hasilnya adalah



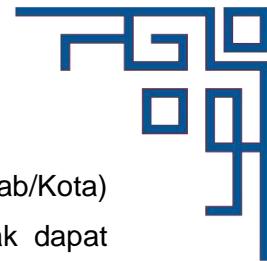
pada tahun 2023 realisasi 6 dari target 2 Lokus mendapat capaian 3% dari beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu Kegiatan Pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual dan kegiatan Himbuan dan Edukasi terkait Pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual. Perberdaan tahun 2023 dengan tahun sebelumnya, di tahun 2022 mendapat realisasi 9 dengan capaian 4,5% sedangkan tahun 2023 capaian mendapat 3%, ini berarti ada beberapa lokus tidak dilaksanakan kegiatan, karena bisa disebabkan dari anggaran yang tidak cukup;

- c. **“Indikator Kinerja Kegiatan” Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah”** : Tahun 2023 telah dilaksanakan beberapa kegiatan terkait pemantauan dengan berkolaborasi bersama instansi terkait diantaranya pemantauan produk yang dilaksanakan pada mall jayapura, toko ifan sport dan mall abepura. Dari hari kegiatan pemantauan mendapat realisasi sebanyak 4 dari target 1 laporan sehingga capaian memperoleh 4%, selanjutnya perbandingan tahun 2023 dengan tahun 2022, menunjukkan di tahun 2022 mendapat capaian 9% dari target 1 laporan dengan realisasi sebanyak 9 yang di peroleh dari kegiatan pemantauan dipusat perbelanjaan di Kota/Kabupaten Jayapura, serta dikeluarkannya sertifikat.

5. **Sasaran Kinerja Kegiatan “ Rekomendasi hasil analisis strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia dengan indikator kinerja kegiatan “ :**

- a. **Persentase rekomendasi hasil kajian diwilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia** : Pada tahun 2023 triwulan II telah dilaksanakan kegiatan formulasi kebijakan analis pada Lembaga Bantuan Hukum di Kab. Biak Numfor. Dari kegiatan ini menunjukkan hasil realisasi 80% dari target 80% sehingga capaian telah memenuhi 100%, namum pada tahun 2022 tidak dilaksanakan dikarekanakan terdapat bintang pada anggaran kegiatan tersebut;
- b. **Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah:** Di triwulan II pada bulan mei tahun 2023 telah dilaksanakan kegiatan penelitian yang menghasilakn 1 buku, artinya telah memenuhi target 1 buku sehingga capaian mencapai 100%, dibandingkan dengan tahun 2022 capaian juga telah memenuhi 100% dari realisasi 1 buku.

6. **Sasaran Kegiatan : “ Terasilitasinya rancangan produk hukum daerah ” dengan indikator kinerja kegiatan Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham** : Tahun 2023 rancangan perda telah mencapai 101% dari realisasi 81% sehingga ini menunjukkan bahwa telah memenuhi dan melebihi target 80%, perolehan ini terjadi dari beberapa kegiatan pengharmonisasian. Sedangkan jika dilihat dari tahun 2022 realisasi sebanyak 83 sehingga capaian 103% ini dihasilkan dari pelaksanaan Pengharmonisasian Raperda di beberapa Kab/Kota yang di Provinsi Papua yang menghasilkan sebanyak 77 Raperda. Capaian ini memiliki beberapa



kendala yang di sebabkan oleh masih banyaknya pemerintah daerah (Prov/Kab/Kota) yang belum memiliki Perda tentang Bantuan Hukum sehingga Pemda tidak dapat memberikan Bantuan Hukum bagi masyarakatnya;

- 7. Sasaran Kegiatan “ Terselenggaranya pembinaan perancangan peraturan perundang – undangan dengan indikator kinerja kegiatan “ Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang – undangan” :** Pembinaan perancang peraturan perundang – undangan telah di laksanakan pada Kegiatan Pembinaan Pola Karir Perancang Daerah dengan mendapat peserta sebanyak 12 orang, artinya dari target 6 orang telah terpenuhi dan melebihi jadi capaiannya sebesar 200% ditahun 2023, sedang ditahun 2022 terdapat 14 orang yang mengikuti pembinaan dengan target 14 orang menjadi capaian 100%. Kurangnya peserta pembinaan ini juuga disebabkan oleh Kurangnya dukungan pemerintah daerah untuk pelaksanaan Desa/Kelurahan/Keluarga Sadar Hukum namun kedepannya perlu adanya dorongan agar Pemda menyusun / menyiapkan Perda tentang Bantuan Hukum untuk kemudian dapat memberikan Bantuan Hukum bagi Masyarakat;
- 8. Sasaran kegiatan Terselenggaranya fasilitasi perencanaan dan peninjauan/analisa dan evaluasi produk hukum di wilayah : Indikator kegiatannya “ Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah “ :** Tahun 2023 telah melaksanakan kegiatan dengan instansi terkait untuk pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah. Adapun 2 kegiatan yang telah dilaksanakan, berarti telah mencapai 100% dari target 2 kegiatan. Selanjutnya kegiatan tahun 2022 juga mencapai target 100% dari realisasi 2 kegiatan yang telah di laksanakan pada triwulan III dengan Biro Hukum Pemerintah Daerah;
- 9. Sasaran kegiatan “ Meningkatkan kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah “ dengan 4 (empat) indikator kegiatan yaitu :**
 - a. Persentase permohonan bantuan hukum ligitasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang – undangan :** indikator kegiatan telah dilaksanakan di tahun 2023 dengan realisasi 90 capaian 109,75% dari target 82%. Selanjutnya ditahun 2022 realisasi 72% dari target 81% serta capaian 89% dari pelaksanaan kegiatan Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada masyarakat kurang mampu dan telah menyerap 76,69% dari Total anggaran Bankum yang telah di serap oleh 5 (Lima) Organisasi Bantuan Hukum. Dapat dilihat bahwa ditahun 2022 ke 2023 mengalami kenaikan, akan tetapi tidak terlalu signifikan ini disebabkan karena masih minimnya Lembaga Bantuan Hukum yang sudah terverifikasi dan terakreditasi serta belum adanya anggaran bantuan hukum yang lebih memadai untuk dapat membantu masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum.

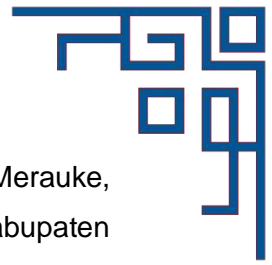


Harapannya bertambah banyaknya jumlah OBH yang sudah teverifikasi dan terakreditasi di wilayah provinsi papua, papua tengah, papua selatan dan papua pegunungan agar Masyarakat miskin dapat memperoleh akses bantuan hukum dan adanya anggaran bantuan hukum yang lebih memadai untuk dapat membantu masyarakat miskin yang berhadapan dengan permasalahan hukum;

- b. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan perundang – undangan :** Berdasarkan hasil menunjukkan ditahun 2023 telah dilaksanakan permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai perundang – undangan dengan realisasi sebanyak 63 dan dapat diperhitungkan capaian mencapai 78,75%, adapaun ditahun 2022 mendapat realisasi sebanyak 84 dengan capaian 105%, sehingga dilihat bahwa terjadi penurunan;
- c. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum :** Ditahun 2023 telah dilaksanakan pengisian indeks kepuasan layanan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum pada saat Monev Pemberi Bantuan Hukum dengan realisasi 76 sehingga capaiannya menjadi 99% dari target 76,75%. Sedangkan ditahun 2022 indeks mencapai 94,73% dari target 76%;
- d. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing – masing wilayah :** Tahun 2023 tidak dilaksanakan kegiatan atau tidak terbentuknya desa/kelurahan sadar hukum, akan tetapi hanya di lakukan pemantauan sehingga tidak ada capaian. Namun di tahun 2022 telah dilaksanakan kegiatan desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk dengan realisasi sebanyak 60% dari target 70% dengan capaian 85,71%;
- e. Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN :** Berdasarkan hasil monitoring menunjukkan bahwa ada sekitar 60 JDIHN namun sebanyak 18 belum terintegrasi dengan portal/sistem. Dari hasil ini dapat diperhitungkan sebanyak 42 telah terintegrasi, jadi bisa disimpulkan realisasi tahun 2023 sebanyak 42 dari target 20% sehingga capaian mencapai 210%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 mendapat realisasi sebanyak 60 dari target 20% sehingga capaian menjadi 300%. Ini berarti adanya penurunan.

10. aksi HAM ” dengan Indikator kinerja kegiatannya :

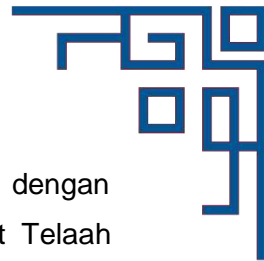
- a. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM :** Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM terdapat 7 daerah yaitu Kabupaten Asmat, Kota Jayapura, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Keerom dan Provinsi Papua. Sehingga capaian indikator kegiatan adalah 1,75% yang melebihi target 4 Instansi Pemerintah.
- b. Jumlah Kabupaten/Kota peduli HAM :** Ditahun 2023 Pelaporan KKP HAM di Lakukan 1 Tahun sekali pada 30 Mei 2023 pelaporan KKP HAM yang melapor yaitu



Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mimika, Kabupaten Jayawijaya dan Mamberamo Tengah. Sehingga ada sekitar 9 pemerintah daerah yang telah melaksanakan kab/kota peduli HAM, berarti dari rumus perhitungan dapat disimpulkan di tahun 2023 mendapat capaian sebesar 3% ini menunjukkan telah terpenuhinya target yang di tetapkan;

- c. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM :** Tahun 2023 pada triwulan I telah dilaksanakan Kegiatan Penguatan HAM di Kabupaten Merauke kepada UPT PAS,UPT Imigrasi dan Setda Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel kepada UPT PAS dan Setda dan jajaran di Kabupaten Boven Digoel, dan Rakoor Diseminasi Penguatan Pelaporan KKP HAM dan Aksi HAM. Triwulan II penguatan terkait Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) di Lapas Klas IIB Serui, dan Lapas Nabire dan Pemda Nabire dan telah diterima penghargaan dari Kanim Kelas II TPI Jayapura. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 adalah 9 dari realisasi 9% dari target 1 Instansi, ini menunjukkan adanya pemerintah telah melaksanakan diseminasi dan penguatan HAM;

- 11. Sasaran Kegiatan” Meningkatkan rekomendasi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah dengan indikator kinerja kegiatan “ tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di wilayah :** Untuk mencapai target indikator kinerja kegiatan ada beberapa kegiatan yang telah di laksanakan selama tahun 2023 yaitu : terdapat pelaporan melalui aplikasi simasham dari Lapas Narkotika kasus penipuan dan telah dilaksanakan penelaahan, dilaksanakan rekomendasi dan telaah pengaduan pada Pos Yankomas Kanwil pada kasus Pengaduan Tenaga Nakes Rumah Sakit Abepura, melakukan telaah pengaduan dari Bapak Ofram Manggaprouw terkait dugaan Pelanggaran HAM oleh Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, telaah pengaduan dari Bapak Ofram Manggaprouw terkait dugaan Pelanggaran HAM oleh Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, telaah pengaduan dari Bapak Sjaltiel Simbiak Pegawai Distrik Yawosi Kabupaten Biak Numfor terkait dugaan Pelanggaran HAM terkait Pembayaran Gaji PNS yang di laporkan Melalui Pos Yankomas Kantor Imigrasi TPI Biak di Biak, telah terlaksananya/terselesaikannya penyelesaian Rekomendasi terkait pengaduan dari Bapak Sjaltiel Simbiak Pegawai Distrik Yawosi Kabupaten Biak Numfor terkait dugaan Pelanggaran HAM terkait Pembayaran Gaji PNS yang di laporkan Melalui Pos Yankomas Kantor Imigrasi TPI Biak di Biak, Menerima Konsultasi dan Koordinasi Saudara Kristian Griapon terkait Penyalahgunaan Putusan Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura Perkara Perdata Nomor 87/Pdt.G/2010/PN-JPR dalam transaksi jual beli Tanah Adat Suku Genyem,Lokasi Puskesmas Genyem Distrik



Nimboran, Antara Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura Pengguna Tanah dengan Penyerobot Tanah, Tekai Kampung Benyom, An. Tomas Bano dan membuat Telaah terkait Penyampai Komunikasi Pegawai Lising. Dari kegiatan – kegiatan tersebut mendapat realisasi sebanyak 4 rekomendasi, sehingga capaian menjadi 100%.

Tabel 1.3 Pencapaian Sasaran Kegiatan Divisi Imigrasi

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25 (Indeks)	3,87	119%
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13 (Indeks)	3,58	113%

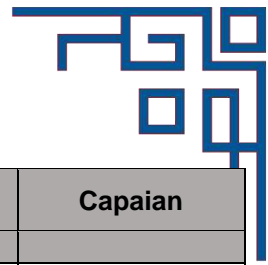
Sasaran kegiatan “ Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah “ dengan indikator :

- a. **Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah :** Tahun 2023 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di wilayah mengalami peningkatan sebanyak 119%
- b. **Indeks Pengaman Keimigrasian di wilayah :** Mengalami peningkatan sebesar 119% dengan realisasi 3,87%

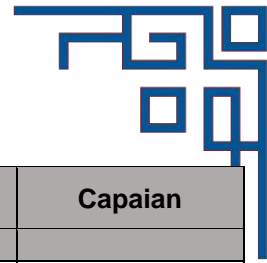
Tentunya capaian indikator kegiatan Divisi Imigrasi ini dapat diperoleh dari penyebaran informasi dan perluasan pelayanan paspor di seluruh wilayah Kantor Imigrasi dan pengawasan dan penindakan hukum.

Tabel 1.4 Pencapaian Sasaran Kegiatan Divisi Pemasarakatan

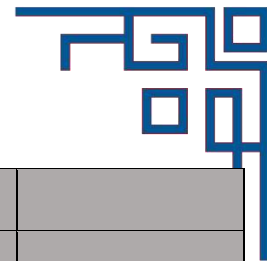
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemsarakatan yang berkualitas di wilayah	1. Indeks penyelenggaraan pemsarakatan di wilayah	82 (Indeks)	43	0.52%
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%	88	98%
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%	79	88%



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)		
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%	87	97%
3.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%	84	120%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%	86	87%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%	-	-
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%	81	95%
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	17%	81	476%
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%	84	400%
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%	87	121%
4.	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	80%	87	108,75%
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuat hukum tetap	80%	84	105%
5.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	60%	84	140%
		2. Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan	55%	84	153%



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)		
	pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	putusan pidana penjara			
		3. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35%	77	220%
6.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	1. Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	80%	85	106,25%
		2. Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%	88	88%
		3. Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	90%	87	97%
		4. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	90%	77	85,5%
7.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	1. Persentase pengaduan yang diselesaikan	85%	84	99%
		2. Persentase pencegahan gangguan kamtib	80%	84	105%
		3. Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/ Anak Pelaku gangguan Kamtib	85%	84	99%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	84	105%
8.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	84	99%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	87	108,75
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib	85%	81	96%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	78	97,5%



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%	84	105%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	90	96%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%	87	90%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	87	108,75%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	90	105,9%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	90	105,9%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	81	101,25%
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	27%	81	300%



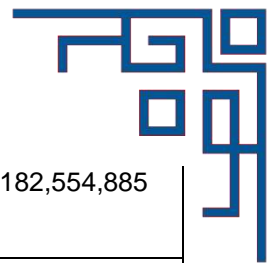
Sasaran kegiatan Divisi Pemasyarakatan : Tahun 2023 terdapat 28 Indikator Perjanjian Kinerja yang telah tercapai. Dengan nilai SPPN meningkat sebanyak 82,5% dan Tahanan yang memperoleh bankum meningkat sebanyak 90%. Tentunya capaian indikator kinerja kegiatan Divisi Pemasyarakatan dengan strategi sebagai berikut WBP mendapat pelatihan dan memperoleh sertifikat, jumlah basan barang telah terjaga dan terawat dengan baik, pengaduan telah ditangani dengan baik, dilaksanakan rehabilitasi medis dan sosial, WBP anak mendapat pendidikan, serta WBP mendapat bantuan hukum dan pengawasan atas penyeludupan ke lapas.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2023 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM mendapatkan anggaran sejumlah **Rp 184,463,508,000** hingga tanggal 31 Desember 2023 telah terealisasi sebesar **Rp 182,184,650,585** atau **98,76%**. Adapun perbandingan anggaran tahun 2022 dengan tahun 2023 per 31 Desember :

Tabel. 2.1 Realisasi Tahun 2022

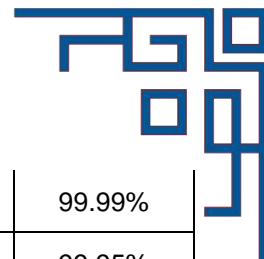
NO	KODE NAMA SATKER	TOTAL (Rp)			
		PAGU	REALISASI	%	SISA
1	408902 KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA (DITJEN AHU)	1,859,150,000	1,834,065,745	98.65	25,084,255
2	408903 KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA (DITJEN PAS)	1,240,098,000	1,228,569,047	99.07	11,528,953
3	408904 KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA (DITJEN IMIGRASI)	2,356,106,000	2,238,695,077	95.02	117,410,923
4	408905 KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA (DITJEN KI)	804,321,000	792,707,318	98.56	11,613,682
5	408906 KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA (SETJEN)	18,992,934,000	18,829,962,426	99.14	162,971,574
6	408907 KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA (DITJEN PP)	275,000,000	274,544,000	99.83	456,000
7	408908 KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA (DITJEN HAM)	367,670,000	367,068,000	99.84	602,000
8	408909 KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA (BPHN)	584,721,000	564,929,630	96.62	19,791,370
9	408910 KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA (BALITBANGHAM)	172,347,000	171,847,000	99.71	500,000
10	407794 LEMBAGA PEMASYARAKATAN ABEPURA	14,689,972,000	14,588,755,487	99.31	101,216,513



11	653051 LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA JAYAPURA	12,910,937,000	12,728,382,115	98.59	182,554,885
12	407823 LEMBAGA PEMASYARAKATAN BIAK	7,460,571,000	7,440,213,520	99.73	20,357,480
13	407839 LEMBAGA PEMASYARAKATAN SERUI	6,249,486,000	6,241,672,274	99.87	7,813,726
14	407808 LEMBAGA PEMASYARAKATAN WAMENA	7,311,067,000	7,156,733,735	97.89	154,333,265
15	407845 LEMBAGA PEMASYARAKATAN MERAUKE	10,507,883,000	10,462,250,175	99.57	45,632,825
16	407814 LEMBAGA PEMASYARAKATAN NABIRE	7,076,797,000	6,868,184,956	97.05	208,612,044
17	652873 LEMBAGA PEMASYARAKATAN TIMIKA	7,770,827,000	7,586,111,306	97.62	184,715,694
18	352615 LPKA JAYAPURA PROVINSI PAPUA	4,988,549,000	4,617,720,201	92.57	370,828,799
19	418360 LAPAS PEREMPUAN KELAS III JAYAPURA	4,739,452,000	4,683,848,321	98.83	55,603,679
20	409233 LAPAS KELAS III TANAH MERAH	3,627,269,000	3,618,975,749	99.77	8,293,251
21	632751 RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAN NEGARA JAYAPURA	2,337,680,000	2,270,171,695	97.11	67,508,305
22	109149 BALAI PEMASYARAKATAN JAYAPURA	3,963,112,000	3,649,922,081	92.10	313,189,919
23	653201 BALAI PEMASYARAKATAN MERAUKE	2,390,469,000	2,187,583,460	91.51	202,885,540
24	408625 BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II KEEROM	1,239,077,000	1,236,657,242	99.80	2,419,758
25	408253 KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JAYAPURA	17,884,363,000	15,596,915,747	87.21	2,287,447,253
26	109159 KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TEMBAGAPURA	7,108,511,000	6,781,479,967	95.40	327,031,033
27	408262 KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BIAK	7,720,184,000	7,413,257,622	96.02	306,926,378
28	408284 KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI MERAUKE	9,733,705,000	9,345,522,781	96.01	388,182,219
29	664701 RUMAH DETENSI IMIGRASI JAYAPURA	6,621,164,000	6,400,236,109	96.66	220,927,891
TOTAL PAGU PAPUA		172,983,422,000	167,176,982,786	96.64	5,806,439,214

Tabel 2.2 Realisasi Tahun 2023

No.	Kode Nama Satker	Pagu	Realisasi	Sisa	%Realisasi
1	BALITBANGHAM	223,029,000	223,017,350	11,650	99.99%
2	BALAI PEMASYARAKATAN MERAUKE	2,169,403,000	2,169,204,718	198,282	99.99%



3	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WAMENA	7,417,897,000	7,416,886,684	1,010,316	99.99%
4	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MERAUKE	11,715,101,000	11,708,763,142	6,337,858	99.95%
5	LAPAS PEREMPUAN KELAS III JAYAPURA	4,673,493,000	4,669,810,741	3,682,259	99.92%
6	DITJEN PP	310,000,000	309,731,441	268,559	99.91%
7	DITJEN HAM	378,170,000	377,742,170	427,830	99.89%
8	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II KEEROM	1,462,571,000	1,459,812,061	2,758,939	99.81%
9	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SERUI	6,128,665,000	6,113,753,266	14,911,734	99.76%
10	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NABIRE	7,038,093,000	7,018,894,888	19,198,112	99.73%
11	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ABEPURA	15,803,897,000	15,752,246,836	51,650,164	99.67%
12	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BIAK	7,152,439,000	7,128,966,461	23,472,539	99.67%
13	DITJEN PAS	1,076,796,000	1,072,660,633	4,135,367	99.62%
14	DITJEN KI	1,110,606,000	1,105,515,665	5,090,335	99.54%
15	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI MERAUKE	9,224,693,000	9,180,845,914	43,847,086	99.52%
16	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA JAYAPURA	12,986,535,000	12,911,174,621	75,360,379	99.42%
17	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAN NEGARA JAYAPURA	6,257,280,000	6,218,075,723	39,204,277	99.37%
18	DITJEN AHU	2,045,065,000	2,032,135,683	12,929,317	99.37%
19	BPHN	893,823,000	887,125,390	6,697,610	99.25%
20	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BIAK	7,829,579,000	7,740,736,649	88,842,351	98.87%
21	DUKUNGAN MANAJEMEN (SETJEN)	21,289,659,000	21,046,803,852	242,855,148	98.86%
22	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JAYAPURA	19,703,066,000	19,246,666,025	456,399,975	97.68%
23	LAPAS KELAS III TANAH MERAH	3,596,708,000	3,511,398,859	85,309,141	97.63%
24	DITJEN IMIGRASI	2,491,106,000	2,424,978,816	66,127,184	97.35%
25	LPKA JAYAPURA	5,250,347,000	5,101,494,385	148,852,615	97.16%
26	RUMAH DETENSI IMIGRASI JAYAPURA	6,111,321,000	5,937,664,177	173,656,823	97.16%
27	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TEMBAGAPURA	8,796,475,000	8,521,624,865	274,850,135	96.88%
28	BALAI PEMASYARAKATAN JAYAPURA	3,258,010,000	3,148,712,030	109,297,970	96.65%
29	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TIMIKA	8,069,681,000	7,748,207,540	321,473,460	96.02%
	TOTAL	184,463,508,000	182,184,650,585	2,278,857,415	98.76%



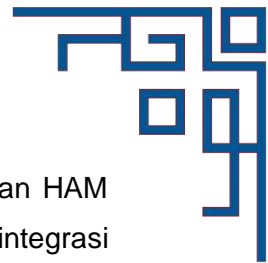
C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

Capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua dapat diukur melalui 2 (dua) indikator lainnya, yaitu pada aplikasi SMART DJA dan IKPA. Untuk penilaian pada aplikasi SMART DJA Kantor Wilayah Papua 2023 :

1) SMART DJA

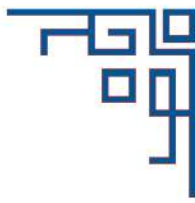
Tabel 3.1 Capaian SMART DJA Per Desember 2023

NO	NAMA SATKER	DESEMBER					
		NILAI KINERJA	PENYERAPAN	KONSISTENSI	CRO	EFISIENSI	NILAI EFISIENSI
1	DITJEN AHU	99.93	99.37	99.95	100	20	100
2	DITJEN PEMASYARAKATAN	99.96	99.62	99.97	100	20	100
3	DITJEN KEIMIGRASIAN	99.69	97.35	99.72	100	20	100
4	DITJEN KI	99.94	99.54	99.93	100	20	100
5	SETJEN	99.87	98.86	99.9	100	20	100
6	DITJEN PP	99.99	99.91	99.99	100	20	100
7	DITJEN HAM	99.98	99.89	99.96	100	20	100
8	BPHN	99.92	99.25	99.94	100	20	100
9	BALITBANGKUMHAM	100.00	99.99	100	100	20	100
10	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ABEPURA	95.00	99.67	99.97	100	13.05	82.64
11	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WAMENA	99.77	99.99	98.73	100	20	100
12	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NABIRE	85.32	99.73	97.01	100	0.27	50.68
13	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BIAK	85.19	99.67	94.41	100	0.75	51.87
14	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SERUI	88.57	99.76	96.42	100	4.96	62.39
15	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MERAUKE	85.72	99.95	99.94	100	0.05	50.14
16	LAPAS KELAS III TANAH MERAH	87.04	97.63	99.28	100	2.37	55.93
17	LAPAS PEREMPUAN	99.99	99.92	100	100	20	100
18	LPKA JAYAPURA	87.71	97.16	98.97	100	3.45	58.63
19	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAN NEGARA JAYAPURA	85.25	99.37	95.42	100	0.63	51.57
20	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TIMIKA	91.09	96.02	53.15	100	20	100
21	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA JAYAPURA	86.65	99.42	99.91	100	1.44	53.59
22	BAPAS JAYAPURA	97.72	96.65	89.25	100	20	100
23	BAPAS KEEROM	99.96	99.81	99.88	100	20	100
24	BALAI PEMASYARAKATAN MERAUKE	85.54	99.99	99.11	100	0.01	50.02
25	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI MIMIKA	87.32	96.88	98.27	100	3.12	57.81
26	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JAYAPURA	97.04	97.68	99.81	100	16.22	90.55
27	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BIAK	99.08	98.87	95.52	100	20	100
28	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI MERAUKE	87.79	99.52	99.96	100	3	57.51
29	RUMAH DETENSI IMIGRASI JAYAPURA	97.70	97.16	97.59	100	17.78	94.45



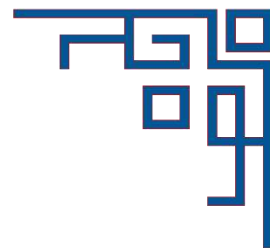
Pada tahun 2023 nilai SMART untuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua adalah **94,04%** dan Nilai IKPA sebesar **98, 23%**. Aplikasi SMART DJA telah terintegrasi dengan aplikasi SAKTI sehingga penginputan Capaian Output di Sakti akan secara langsung menginput nilai SMART. Sedangkan IKPA adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur Kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap Perencanaan, Efektivitas Pelaksanaan Anggaran, Efisiensi Pelaksanaan Anggaran, dan Kepatuhan terhadap Regulasi. Tujuan Pengukuran Kinerja dengan IKPA yaitu untuk Kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung Manajemen Kas dan Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan.





Tabel 3.2 Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	63	13	408625	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II KEEROM	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	100.0
2	63	13	408904	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	70.00	70%	100.00
3	138	13	407839	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SERUI	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	100.00
4	141	13	109159	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TEMBAGAPURA	Nilai	100.00	77.27	94.31	78.57	100.00	98.97	100.00	100.00	94.34	100%	94.34
5	63	13	632751	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAN NEGARA JAYAPURA	Nilai	100.00	93.53	84.58	91.00	100.00	92.29	100.00	100.00	94.60	100%	94.60
6	63	13	408909	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA	Nilai	100.00	73.33	100.00	0.00	0.00	87.98	100.00	100.00	76.13	80%	95.16
7	63	13	664701	RUMAH DETENSI IMIGRASI JAYAPURA	Nilai	100.00	91.41	95.91	0.00	0.00	89.12	100.00	100.00	77.24	80%	96.54
8	63	13	408907	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA	Nilai	100.00	91.95	100.00	0.00	0.00	85.96	100.00	100.00	77.79	80%	97.24
9	63	13	408253	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JAYAPURA	Nilai	100.00	93.03	96.52	92.50	100.00	95.40	100.00	100.00	97.40	100%	97.40
10	63	13	408905	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA	Nilai	100.00	85.49	98.58	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	68.27	70%	97.5
11	141	13	652873	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TIMIKA	Nilai	100.00	83.74	98.41	100.00	100.00	96.36	100.00	100.00	97.69	100%	97.69
12	68	13	653201	BALAI PEMASYARAKATAN MERAUKE	Nilai	100.00	83.73	100.00	0.00	0.00	98.31	100.00	100.00	78.20	80%	97.76
13	63	13	109149	BALAI PEMASYARAKATAN JAYAPURA	Nilai	100.00	82.61	100.00	100.00	100.00	96.26	100.00	100.00	97.89	100%	97.89
14	68	13	408284	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI MERAUKE	Nilai	100.00	84.45	100.00	97.00	100.00	99.74	100.00	100.00	98.12	100%	98.12
15	63	13	408910	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA	Nilai	100.00	87.20	100.00	0.00	0.00	98.74	100.00	100.00	78.59	80%	98.24
16	63	13	352615	LPKA Jayapura, Provinsi Papua	Nilai	100.00	88.63	99.48	100.00	100.00	95.09	100.00	100.00	98.27	100%	98.27
17	63	13	408908	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA	Nilai	100.00	86.35	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	78.64	80%	98.29
18	68	13	409233	LAPAS KELAS III TANAH MERAH	Nilai	100.00	83.32	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.33	100%	98.3
19	63	13	407794	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ABEPURA	Nilai	100.00	88.71	98.34	100.00	100.00	97.75	100.00	100.00	98.31	100%	98.31
20	63	13	653051	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA JAYAPURA	Nilai	100.00	89.25	100.00	97.00	100.00	99.76	100.00	100.00	98.60	100%	98.60
21	63	13	408902	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA	Nilai	100.00	91.87	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	69.19	70%	98.84
22	63	13	408906	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA	Nilai	100.00	91.48	100.00	100.00	100.00	99.75	100.00	100.00	99.12	100%	99.12
23	63	13	408903	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	93.02	100.00	100.00	79.30	80%	99.13
24	64	13	408262	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BIAK	Nilai	100.00	92.86	100.00	100.00	100.00	99.75	100.00	100.00	99.26	100%	99.26
25	68	13	407845	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MERAUKE	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	92.55	100.00	100.00	99.26	100%	99.26
26	63	13	418360	Lapas Perempuan Kelas III Jayapura	Nilai	100.00	94.84	100.00	100.00	100.00	99.94	100.00	100.00	99.48	100%	99.4
27	64	13	407823	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BIAK	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.10	100.00	100.00	99.71	100%	99.71
28	85	13	407814	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NABIRE	Nilai	100.00	100.00	99.05	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.81	100%	99.81
29	113	13	407808	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WAMENA	Nilai	100.00	100.00	99.80	100.00	100.00	99.41	100.00	100.00	99.90	100%	99.90



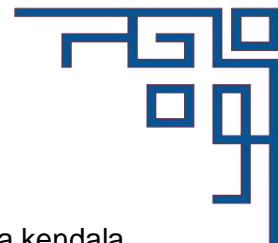
D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

1) Aplikasi E-Performance

Pengisian e-performance penting dilakukan karena bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja satuan kerja, bukan itu saja sistem ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan.

Tabel 4.1 Monitoring Penginputan E-Performance

NO	SATKER	BULAN											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1	DIVISI ADMINISTRASI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	DIVISI PEMASYARAKATAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	DIVISI IMIGRASI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	DIVISI YANKUMHAM (KI)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	DIVISI YANKUMHAM (AHU)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	DIVISI YANKUMHAM (PP)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	DIVISI YANKUMHAM (BPHN)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	DIVISI YANKUMHAM (HAM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	DIVISI YANKUMHAM (BSK)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	LP ABEPURA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	LP WAMENA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	LP NABIRE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	LP BIAK	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	LP SERUI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	LP MERAUKE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	LP TIMIKA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	LP NARKOTIKA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	LP PEREMPUAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	LPKA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	LP TANAH MERAH	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	BAPAS JAYAPURA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	BAPAS MERAUKE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	BAPAS KEEROM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	RUPBASAN JAYAPURA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	KANIM MIMIKA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26	KANIM JAYAPURA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27	KANIM BIAK	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28	KANIM MERAUKE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
29	RUDENIM JAYAPURA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



2) Target Kinerja

Pelaksanaan atrget Kinerja telah dilaksanakan dengan baik, namun ada beberapa kendala kekurangan data dukung yang diupload, berikut ini adalah nilai target kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua, yaitu :

Tabel 4.3 Monitoring Tarja

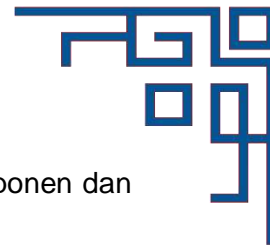
NO	RENCANA AKSI TARGET KINERJA	CAPAIAN											
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
DIVISI ADMINISTRASI													
1	Meningkatnya nilai SAKIP Kantor Wilayah	100	100	100	100	100	69	100	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM	100	100	100	100	100				100	100		
3	Implementasi Manajemen Risiko (MR)									100			100
4	Peningkatan jumlah aset berupa tanah dan bangunan yang tercatat dalam SIMAK BMN dan memiliki sertifikat			100			100			100			100
5	Optimalisasi Pemanfaatan aplikasi khusus unit utama diwilayah			100			100			100			0
6	Penyajian informasi kinerja dan pemberitaan positif yang cepat, tepat, akurat dan akuntabel			100	100	100	100	100	100	100			100
7	Optimalisasi implementasi Corporate University dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM di Bidang Hukum dan HAM			100			100	100	100	100			100
8	Tata kelola digitalisasi kearsipan dilingkungan Kantor Wilayah			100		100	100	100	100	100			100
9	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pencapaian Target Kinerja			100			100			100	100		100
DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM													
1	Peningkatan Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam memfasilitasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah, DPRD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah	100	100	100	100	100	100	91	91	76	100	100	100
2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pemberian Bantuan Hukum						100			100			100
3	Monitoring dan Evaluasi Hasil Survei IPK-IKM serta Indeks Integritas Organisasi dimanfaatkan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik Kementerian Hukum dan HAM diwilayah			88			80			76			67
4	Memastikan pelayanan dibidang administrasi hukum umum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Penyebaran Informasi layanan AHU diwilayah (Kewarganegaraan, Pewarganegaraan Apostille, dan Perseroan)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Penerapan PMPJ dan Pengawasan Audi Kepatuhan Terhadap Notaris	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Pembaharuan Data Notaris dan Identifikasi Status Notaris	100	100	100	100	100	100			100		100	100
8	Pengumpulan data alamat kantor dan pekengurusan parta politik tingkat provinsi	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Pendataan anakan berkewarganegaraan ganda terbatas berdasarkan UU nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



10	Terlaksananya kegiatan - kegiatan layanan KI yang diinisiasi melalui kerjasama yang telah ada atau membentuk MoU/PKS baru dalam rangka mendukung tahun Hak Merek dan peningkatan KIK	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11	Penegakan perlindungan kekayaan intelektual di wilayah: Sertifikasi pusat belanja perbelanjaan berbasis Kekayaan Intelektual dengan Ruang lingkup Kab/Kota dan tradisional			100			100	100	100	100	100	100	100
12	Mendorong Pemerintah Daerah melaksanakan Aksi Hak Asasi Manusia	100	100	100	100	100	100	70	100	100	100	100	100
13	Meningkatkan Koordinasi dengan Stakeholder dalam rangka mendorong Penyelesaian Dugaan pelanggaran	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
DIVISI PEMASYARAKATAN													
1	Percepatan pelaksanaan <i>Back to Basic</i> Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Pelayanan Tahanan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Percepatan pelaksanaan <i>Back to Basic</i> Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Pemenuhan Hak Tahanan di Lapas dan Rutan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemsarakatan di bidang pengelolaan basan baran	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Penyelenggaraan layanan rehabilitasi pemsarakatan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Terwujudnya pengembangan SDP dalam rangka transformasi layanan pemsarakatan melalui pertukaran data SPPT TI	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Piloting Penerapan Keadilan Restoratif bagi pelaku dewasa pada 10 wilayah <i>Piloting</i>	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Narapidana yang memperoleh pendidikan vokasi dan bersertifikasi	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	Pemutakhiran Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
DIVISI KEIMIGRASIAN													
1	Implementasi Pengembangan layanan paspor secara kesisteman			95			95			100			100
2	Peningkatan profesionalisme SDM dalam melakukan pendataan pengungsi luar negeri, pencari suaka dan final rejected di Wilayah Indonesia			90			100			100			100
3	Pengawasan penjamin virtual orang asing dan kegiatannya			100			100			100			100

3) Aplikasi E-Monev Bappenas

Aplikasi e-Monev Bappenas merupakan aplikasi pelaporan yang dibangun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) Republik Indonesia dalam rangka memantau data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan tahun berjalan. Pelaporan data realisasi hasil



pemantauan dilakukan setiap bulan selama tahun berjalan untuk pelaporan komponen dan RO serta pada saat data capaian indikator kinerja tersedia.

NO	NAMA SATKER	E- MONEV BAPPENAS																				
		KOM	RO	KOM	RO	KOM	RO	KOM	RO	KOM	RO	KOM	RO	KOM	RO	KOM	RO	KOM	RO	KOM	RO	
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER									
1	DITJEN AHU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	DITJEN PEMASYARAKATAN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	DITJEN KEIMIGRASIAN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	DITJEN KI	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	SEKJEN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	DITJEN PP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	28.27%	0%	0%	0%	0%	0%	
7	DITJEN HAM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	BPHN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95%
9	BSK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	NAMA SATKER	E- MONEV BAPPENAS																				
		KOM	RO	KOM	RO	KOM	RO	KOM	RO	KOM	RO	KOM	RO	KOM	RO	KOM	RO	KOM	RO	KOM	RO	
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOV	DESEMBER									
1	BALAI PEMASYARAKATAN JAYAPURA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	LPKA Jayapura, Provinsi Papua	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ABEPURA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%
4	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WAMENA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%
5	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NABIRE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BIAK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95%	92%
7	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SERUI	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	67%	0%
8	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MERAUKE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%
9	LAPAS KELAS III TANAH MERAH	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Lapas Perempuan Kelas III Jayapura	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAN NEGARA JAYAPURA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%
12	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TIMIKA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA JAYAPURA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%
14	BAPAS KEEROM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	BALAI PEMASYARAKATAN MERAUKE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%
16	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI MIMIKA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JAYAPURA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BIAK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
19	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI MERAUKE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
20	RUMAH DETENSI IMIGRASI JAYAPURA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

4) Kegiatan Prioritas Nasional

- a. Lembaga Bantuan Hukum Papua Justice & Peace;
- b. Pemberi Bantuan Hukum Cenderawasih;
- c. Lembaga Bantuan Hukum Papua-Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia;
- d. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garuda Muda Nusantara;
- e. Lembaga Bantuan Hukum Pelita Kasih GPI Papua Merauke;
- f. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kyadawun GKI Klasis Biak Selatan.

Capaian realisasi bantuan hukum di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua adalah Pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi sebesar 99.74%, Pelaksanaan Bantuan Hukum Non Litigasi sebesar 95.18%, Total Capaian realisasi anggaran Bantuan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua per 5 Desember 2023 = 99.2%. Dan terdapat 183 total permohonan Bantuan Hukum sepanjang tahun 2023.

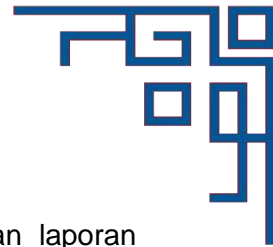


BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

B. SARAN



A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja sebagai upaya pencapaian visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH 01.PR.03 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua telah mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan capaian – capaian kinerja selama tahun 2023 sesuai dengan Perjanjian Kinerja, namun dalam proses pencapaian kinerja Kantor Wilayah Papua juga mengalami kendala ataupun tantangan sehingga ada beberapa tidak mencapai target kinerja. Adapun tantangan – tantangan itu yaitu kekurangan anggaran, SDM yang memiliki kemampuan yang dibutuhkan, pemblokiran anggaran dan sarana dan prasarana yang memadai.

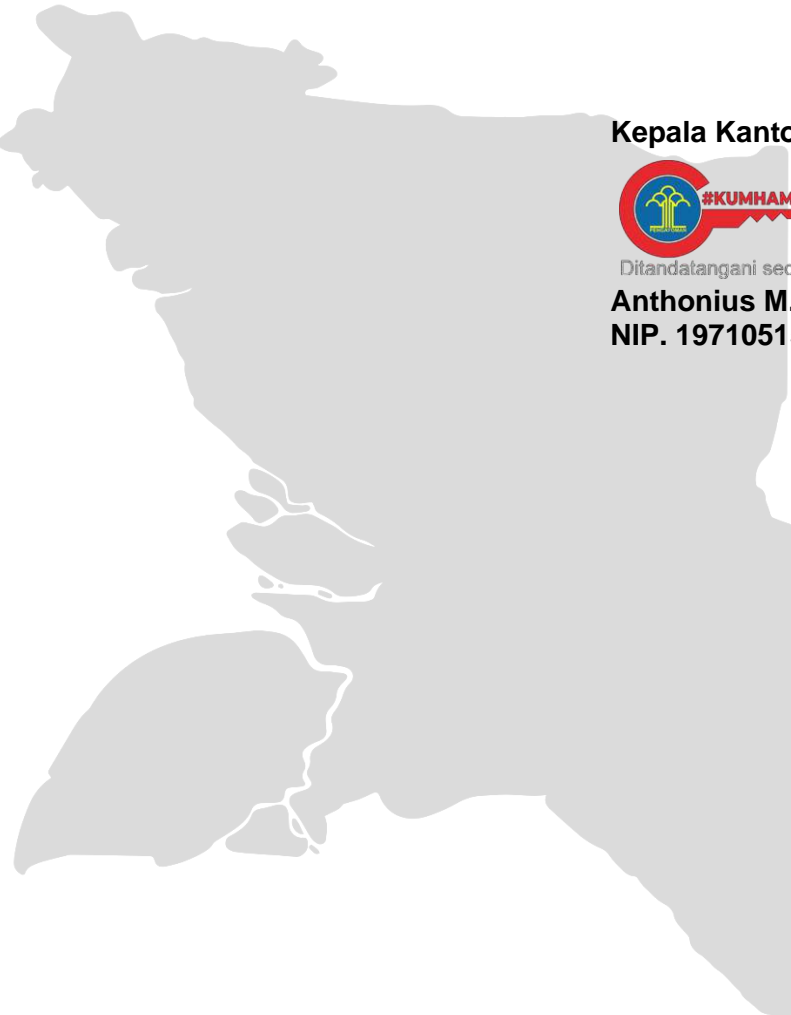
B. SARAN

Untuk dapat lebih meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua sebagai pelaksana tugas Kementerian Hukum dan HAM diwilayah, beberapa masukan Kami sampaikan yaitu:

1. Mengoptimalkan penyerapan anggaran sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) dan Kalender Kinerja yang telah ditetapkan, sehingga dapat meningkatkan capaian nilai IKPA Kantor Wilayah;
2. Melakukan pengawasan dan monitoring terhadap jalannya Perjanjian Kinerja dan Target Kinerja seluruh Divisi dan Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua;
3. Segera Melaksanakan Belanja Modal Produk Dalam Negeri (PDN) dalam mendukung Program Pemerintah;
4. Memberikan Kesempatan Kepada Seluruh ASN dalam kompetensi SDM dengan mengikuti Diklat E-Learning maupun Diklat Klasikal;
5. Melakukan sosialisasi pedoman dan strategi peningkatan IKPA;

6. Melakukan inventaris permasalahan BMN, dan melakukan rapat pimpinan secara intens dan berkala untuk menentukan solusi permasalahan BMN.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua ini dibuat sebagai bahan laporan dan menjadi referensi dalam pengambilan kebijakan selanjutnya bagi kemajuan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua.



Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Antonius M. Ayorbaba
NIP. 19710515 1996101001

LAMPIRAN



- A. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
- B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
- C. PRESTASI/PENGHARGAAN TAHUN 2023

A. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KEPALA DIVISI ADMINISTRASI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hendrik Pagiling
Jabatan : Kepala Divisi Administrasi Papua

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Anthonius Mathius Ayorbaba
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Papua

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jayapura, 23 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Papua

Anthony Mathius Ayorbaba
NIP. 19710515 199610 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Administrasi Papua

Hendrik Pagiling
NIP. 19830502 200112 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI ADMINISTRASI DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAM PAPUA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi. 2. Nilai Akuntabilitas Kinerja	87,0 92,0

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	1. Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB" 2. Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90	94 % 94 %
2.	Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham	WTP

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp 20.200.443.000,-
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Rp 20.200.443.000,-

Jayapura, 23 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Papua


Anthonius Mathius Ayorbaba
NIP. 19710515 199610 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Administrasi Papua


Hendrik Pagiling
NIP. 19830502 200112 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI ADMINISTRASI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hendrik Pagiling
Jabatan : Kepala Divisi Administrasi Papua

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jayapura, 23 Januari 2023

Kepala Divisi Administrasi Papua

Hendrik Pagiling
NIP. 19830502 200112 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhamad Mufid
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Papua

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Anthonius Mathius Ayorbaba
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Papua

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jayapura, 23 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Papua


Anthonius Mathius Ayorbaba
NIP. 187105151996101001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Papua


Muhamad Mufid
NIP. 197603042005011001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM PAPUA DENGAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,25
2.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Persentase KTI yang disitasi	20 %
3.	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan	3,2 (indeks)
4.	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	77 (indeks)
		Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70 %
		Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82 %
		Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80 %
		Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75 (indeks)
5.	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target	75 %
		Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/Kota memenuhi HAM.	45 %

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Hukum Umum yang Berkepastian Hukum	Persentase penyelesaian permohonan layanan administrasi hukum umum yang tepat waktu dan berkepastian hukum	88 %
2.	Terwujudnya Otoritas Pusat yang Efektif dan Tepat Sasaran	Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti	88 %
3.	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di Seluruh Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	3,34 (indeks)
4.	Mewujudkan pemanfaatan rekomendasi hasil analisis kebijakan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan hukum dan hak asasi manusia	Persentase pemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan hukum dan hak asasi manusia	80 %
		Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	20 %
5.	Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas	Persentase (%) Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan	80%
		Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	200 Orang
		Persentase (%) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan	80%
6.	Terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum	Persentase hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	21%
		Persentase jumlah RUU prakarsa pemerintah dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 yang masuk kedalam Prolegnas Prioritas Tahunan	15%
7.	Terwujudnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	77 (Indeks)
		Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%
		Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76.75 (indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berprespektif HAM	Persentase Kab/Kota Peduli HAM	20%
		Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50%
		Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	75%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya layanan adminitrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	1. Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%
		2. Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	86%
2.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	86%
3.	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	133 Layanan
		Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus in
4.	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus
		Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	1 Laporan
5.	Rekomendasi hasil analisis strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	80%
		Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku
6.	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kementerianham	80%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
7.	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	6 Orang
8.	Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan
9.	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%
		Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75 (indeks)
		Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%
		Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN	20%
10.	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	4 Instansi Pemerintah
		Jumlah kab/kota peduli HAM	3 Instansi Pemerintah
		Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah
11.	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 3.966.488.000,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah)	Rp. 2.045.065.000,-
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp. 1.110.606.000,-
Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	Rp. 810.817.000,-
Program Pembentukan Regulasi	Rp. 444.876.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp. 310.000.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp. 134.876.000,-
Program Pemajuan dan Penegakan HAM	Rp. 378.170.000,-
Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	Rp. 378.170.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 223.029.000,-
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	Rp. 223.029.000,-

Jayapura, 23 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Papua


Anthonius Mathius Ayorbaba
NIP. 19710515 199610 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Papua


Muhamad Mufid
NIP. 19760304 200501 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhamad Mufid

Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Papua

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jayapura, 23 Januari 2023

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Papua

Muhamad Mufid
NIP. 19760304 200501 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ian Fidihanto Markos
Jabatan : Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Anthonius Mathius Ayorbaba
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jayapura, 23 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Papua


Anthonius Mathius Ayorbaba
NIP. 19710515 199610 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah
Papua


Ian Fidihanto Markos
NIP. 19691211 199003 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAM PAPUA DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAM PAPUA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,25 (Indeks)
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,25 (Indeks)
2.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25 (Indeks)
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13 (Indeks)

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 16.928.634.000,-
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 16.928.634.000,-

Jayapura, 23 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Papua



Anthonius Mathius Ayorbaba
NIP. 19710515 199610 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah
Papua



Ian Fidihanto Markos
NIP. 19691211 199003 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ian Fidihanto Markos
Jabatan : Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jayapura, 23 Januari 2023

Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah
Papua

Ian Fidihanto Markos
NIP. 19691211 199003 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Endang Lintang Hardiman
Jabatan : Kepala Divisi Pemasyarakatan Papua

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Anthonius Mathius Ayorbaba
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Papua

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jayapura, 23 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Papua

Anthonius Mathius Ayorbaba
NIP. 19710515 199010 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pemasyarakatan Papua

Endang Lintang Hardiman
NIP. 19670620 199303 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN PAPUA DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80 (Indeks)
2.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	1. Persentase klien Pemasarakatan yang produktif, mandiri dan berdayaguna	50,0 %
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai)	80,0 %
		3. Persentase menurunnya residivis	1,0 %
		4. Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	90,0 %
3.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan	80,0 (Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan	85 (Nilai Indeks)
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan	85 (Nilai Indeks)
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan	85 (Nilai Indeks)
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	83 (Nilai Indeks)
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara,	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	56 (Nilai Indeks)
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	92,5 (Nilai Indeks)
		3. Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasarakatan	60 (Nilai Indeks)
		4. Indeks Pembinaan Khusus Anak	74 (Nilai Indeks)
		5. Indeks Pengelolaan Basan Baran	80 (Nilai Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan	6. Indeks Pelayanan Tahanan	80 (Nilai Indeks)
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan	80 (Nilai Indeks)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemsarakatan yang berkualitas di wilayah	1. Indeks penyelenggaraan pemsarakatan di wilayah	82 (Indeks)
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	2. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%
		4. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%
3.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	17%
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%
4.	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	80%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuat hukum tetap	80%
5.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	60%
		2. Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%
		3. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35%
6.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	1. Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	80%
		2. Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%
		3. Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	90%
		4. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	90%
7.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakat di Bidang Keamanan dan Ketertiban	1. Persentase pengaduan yang diselesaikan	85%
		2. Persentase pencegahan gangguan kamtib	80%
		3. Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
8.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	<p>1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar</p> <p>2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas</p> <p>3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal</p> <p>4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani</p> <p>5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</p> <p>6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</p> <p>7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)</p> <p>8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika</p>	<p>80%</p> <p>94%</p> <p>97%</p> <p>80%</p> <p>85%</p> <p>85%</p> <p>80%</p> <p>27%</p>

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 1.076.796.000
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 1.076.796.000

Jayapura, 23 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Papua


Anthonyus Mathius Ayorbaba
NIP. 19710515 199610 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pemasyarakatan Papua


Endang Lintang Hardiman
NIP. 19670620 199303 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Endang Lintang Hardiman
Jabatan : Kepala Divisi Pemasyarakatan Papua

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jayapura, 23 Januari 2023

Kepala Divisi Pemasyarakatan Papua

Endang Lintang Hardiman
NIP. 19670620 199303 1 001

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KEPALA DIVISI ADMINISTRASI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hendrik Pagiling
Jabatan : Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Papua

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Anthonius M. Ayorbaba
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Papua

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

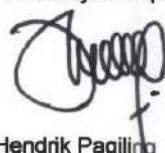
Jayapura, 16 Januari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Papua



Anthonius M. Ayorbaba
NIP. 197105151996101001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Administrasi
Kantor Wilayah Papua



Hendrik Pagiling
NIP. 198305022001121002

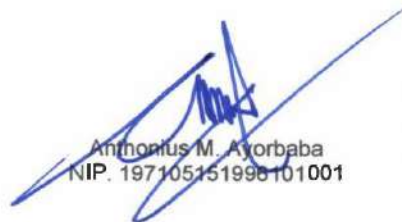
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DIVISI ADMINISTRASI DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp 21.511.722.000,-
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Rp 21.511.722.000,-

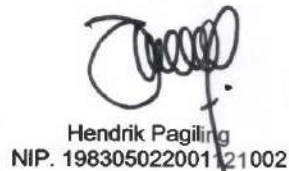
Jayapura, 16 Januari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Papua



Anthonius M. Ayorbaba
NIP. 197105151996101001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Administrasi
Kantor Wilayah Papua



Hendrik Pagiling
NIP. 198305022001121002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DIVISI ADMINISTRASI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hendrik Pagiling
Jabatan : Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Papua

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jayapura, 16 Januari 2024

Kepala Divisi Administrasi
Kantor Wilayah Papua

Hendrik Pagiling
NIP. 198305022001121002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ganda Samosir
Jabatan : Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Papua

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Anthonius M. Ayorbaba
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jayapura, 16 Januari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Papua


Anthonius M. Ayorbaba
NIP. 197105151996101001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Keimigrasian
Kantor Wilayah Papua


Ganda Samosir
NIP. 196606051992031001

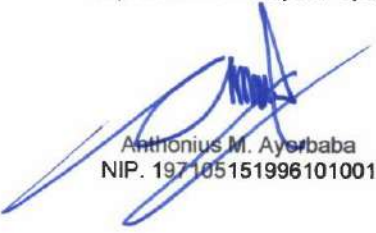
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah 2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,30 (Indeks) 3,14 (Indeks)

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 2.600.583.000,-
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp 2.600.583.000,-

Jayapura, 16 Januari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Papua


Anthonius M. Ayebaba
NIP. 197105151996101001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Keimigrasian
Kantor Wilayah Papua


Ganda Samosir
NIP. 196606051992031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ganda Samosir
Jabatan : Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Papua

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jayapura, 16 Januari 2024

Kepala Divisi Keimigrasian
Kantor Wilayah Papua

Ganda Samosir
NIP. 196606051992031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Endang Lintang Hardiman
Jabatan : Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Papua

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Anthonius M. Ayorbaba
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jayapura, 16 Januari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Papua


Anthonius M. Ayorbaba
NIP. 197105151996101001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pemasyarakatan
Kantor Wilayah Papua


Endang Lintang Hardiman
NIP. 196706201993031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat yang Berkualitas di Wilayah	1. Indeks penyelenggaraan masyarakat di wilayah	83 Indeks
2.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar 2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas 3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal 4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani 5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) 8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	85 % 95 % 98 % 90 % 90 % 90 % 90 % 29 %
3.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying 2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum 3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	100 % 100 % 100 %

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	75 %
		2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	100 %
		3. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	90%
		4. Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	90 %
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	19 %
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	34 %
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	77 %
5.	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	90 %
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuat hukum tetap	100 %
6.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90 %
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	90 %
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	90 %
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	90 %
7.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	70 %
		2. Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	50 %
		3. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	40 %

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	1. Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	85 %
		2. Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100 %
		3. Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	100 %
		4. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	100 %
9.	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat dan Kapasitas Hunian	1. Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Masyarakat (Lapas)	0 UPT
		2. Jumlah UPT Pembangunan Rumah Tahanan Negara (Rutan)	0 UPT
		3. Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Masyarakat Perempuan (LPP)	0 UPT
		4. Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)	0 UPT
		5. Jumlah UPT Pembangunan Balai Masyarakat (Bapas)	0 UPT
		6. Jumlah UPT Rehabilitasi/Renovasi Lapas/Rutan/Bapas/LPKA/Rupbasan	1 UPT

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 1.675.412.000,-
Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah	Rp 1.675.412.000,-

Jayapura, 16 Januari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Papua


Anthonius M. Ayorbaba
NIP. 197105151996101001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Masyarakat
Kantor Wilayah Papua


Endang Lintang Hardiman
NIP. 196706201993031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Endang Lintang Hardiman
Jabatan : Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Papua

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jayapura, 16 Januari 2024

Kepala Divisi Pemasyarakatan
Kantor Wilayah Papua



Endang Lintang Hardiman
NIP. 196706201993031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zuliansyah
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Papua

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Anthonius M. Ayorbaba
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jayapura, 16 Januari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Papua


Anthonius M. Ayorbaba
NIP. 197105151996101001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Papua


Zuliansyah
NIP. 197207012001121002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM DENGAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA**

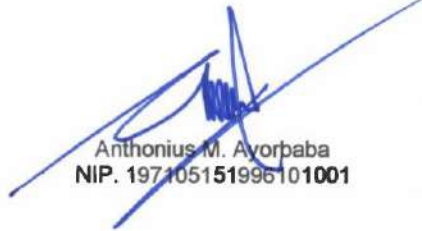
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	5 %
2.	Terwujudnya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris di Kantor Wilayah	Persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	88 %
3.	Terselenggaranya penegakan hukum Kekayaan Intelektual di wilayah	Indeks penegakan hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	3,1 Indeks
4.	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap KI di wilayah	1. Persentase masyarakat yang memahami KI terhadap total masyarakat yang mendapatkan diseminasi/edukasi tentang KI di Wilayah	70 %
		2. Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	17 %
5.	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan peraturan daerah yang difasilitasi oleh kantor wilayah Kemenkumham	80 %
6.	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	5 Orang
7.	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	4 Instansi Pemerintah
		2. Jumlah Kab/kota peduli HAM	2 Instansi Pemerintah
		3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM	1 Instansi Pemerintah
8.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan HAM di Wilayah	Tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah	3 Rekomendasi
9.	Terwujudnya analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah serta fasilitasi perencanaan perda	1. Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan	1 Kegiatan
		2. Jumlah fasilitasi Perencanaan Perda	1 Kegiatan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
10.	Terwujudnya pengelolaan keanggotaan JDH di wilayah	Persentase anggota JDH yang dikelola terhadap total anggota JDH di wilayah	25 %
11.	Meningkatnya layanan bantuan hukum di wilayah	1. Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi	82 %
		2. Persentase layanan bantuan hukum non-litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non-litigasi	80 %
12.	Meningkatnya desa sadar hukum di wilayah	Persentase peningkatan Desa/Kelurahan sadar hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap total usulan kantor wilayah	70 %
13.	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti	80 %

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 4.501.231.000,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah (Kanwil)	Rp 2.045.065.000,-
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp 1.629.881.000,-
Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	Rp 826.285.000,-
Program Pembentukan Regulasi	Rp 563.825.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp 435.000.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp 128.825.000,-
Program Pemajuan dan Penegakan HAM	Rp 378.170.000,-
Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah	Rp 378.170.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp 361.981.000,-
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	Rp 361.981.000,-

Jayapura, 16 Januari 2024

**Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Papua**



Anthonius M. Ayorbaba
NIP. 197105151996101001

**Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Papua**



Zulfiansyah
NIP. 197207012001121002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zuliansyah

Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Papua

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jayapura, 16 Januari 2024

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Papua

Zuliansyah
NIP. 197207012001121002

C. PRESTASI/PENGHARGAAN





